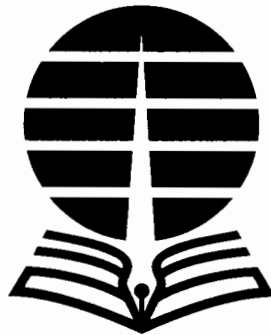


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN
PERIKANAN BUDIDAYA DI KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM ini Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

JOHN HENDRIEK INGRATUBUN

NIM. 016756513

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2014

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA
DI KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Langgur, 28 Juni 2014

Yang Menyatakan,



JOHN HENDRIEK INGRATUBUN

NIM. 016756513

ABSTRAK

ANALISA EKONOMI KELEMBAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA DI KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

JOHN HENDRIEK INGRATUBUN
recky_ing@yahoo.co.id

Kata Kunci : Kelembagaan Ekonomi, Pengembangan

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Kemitraan Usaha dengan nelayan Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil diharapkan menjadi solusi bagi upaya memberdayakan pembudidaya tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis konsep dan mekanisme pelaksanaan kelembagaan PUMP-PB dalam pemberdayaan pembudidaya. 2) Mengidentifikasi bentuk dan strategi kelembagaan PUMP-PB dalam pemberdayaan pembudidaya. 3) Mengukur kinerja kelembagaan PUMP dalam pemberdayaan pembudidaya. Penelitian ini menggunakan metode *survey descriptive* (deskriptif survei).. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Responden diambil dengan menggunakan metode *exhausting sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pola koordinasi yang dikembangkan dalam program PUMP-PB adalah bersifat integrasi vertikal. 2). Kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) yang dibentuk oleh tim teknis kurang sesuai dengan aspirasi pembudidaya rumput laut; 3). Dari segi kepemilikan pembudidaya memiliki hak terhadap segala paket bantuan yang diberikan, sementara dari segi aturan representasi hampir semua pengambilan keputusan dilakukan oleh tim teknis, sementara pembudidaya (KUB) hanya menerima segala keputusan yang telah dibuat; 4).KUB program PUMP-PB belum sepenuhnya mendukung terhadap mekanisme penyaluran bantuan langsung; 5).Struktur organisasi program PUMP-PB secara konsep telah sesuai dengan kaidah organisasi. Namun dalam implementasinya belum dapat berfungsi sesuai tugas dan peran dari masing-masing bagian yang terlibat dalam struktur tersebut. 6). Kurangnya pembinaan yang terjadi terhadap kelompok pembudidaya, menyebabkan saling tidak percaya antara anggota kelompok dan ketua kelompok, bahkan terhadap TIM teknis; dan 8).Monitoring dan evaluasi terhadap semua tahapan kegiatan, belum dilaksanakan secara baik.

ABSTRACT**INSTITUTIONAL ECONOMIC ANALYSIS OF BUSINESS DEVELOPMENT
OF “MINA” RURAL FISHING FARMING IN SUB DISTRICT OF KEI
KECIL, DISTRICT OF SOUTHEAST MALUKU****JOHN HENDRIEK INGRATUBUN****recky_ing@yahoo.co.id**

Keywords: Institutional Economic, Development.

Development of Rural “Mina” Business (PUMP) initiated by Minister of Marine and Fishery through partner business with Southeast Maluku farmers, especially Sub District of Kei Kecil, expected to solve related to farmers empowerment. Research aim was to: 1) analyzed concept and institutional implementation mechanism of PUMP; 2) identified form and institutional strategy of PUMP and; 3) estimated institutional performances of PUMP. Research used descriptive survey methods. Data collected included primary and secondary data. Respondent taken used exhausting samples. Data analysis consists of co-operation concept analysis, co-operation implementation analysis, formed and characteristics of co-operation and co-operation institutional performance analysis. Result shows several conclusions such: 1) coordination pattern develop on PUMP was vertical integrated; 2) institutional of business group (KUB) formed by technical team was unfit with seaweeds farmers’ desires; 3) technical team authority was higher than KUB; 4) KUB not entirely support direct aid distribution mechanism; 5) organization structure of PUMP was fit but on implementation was not functionally to its job and role; 6) monitoring and evaluation of all activities was not well implemented.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Ekonomi Kelembagaan Pengembangan Usaha
Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Di Kecamatan Kei
Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

Penyusun TAPM : John Hendriek Ingratubun

NIM : 016756513

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen
Perikanan

Hari/Tanggal : 28 Juni 2014

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Y. Lopulalan, S.Pi, M.Si
NIP. 19700721 199702 1 002



Dr. Ir Sri Harijati, MA
NIP. 19620911 198803 2 002

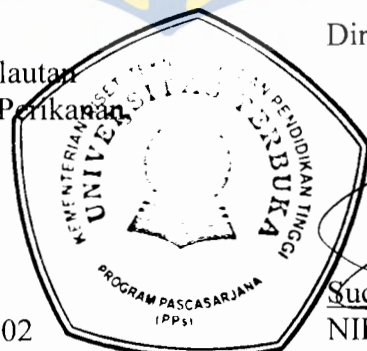
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
NIP. 19631111 198803 2 002



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama : John Hendriek Ingratubun
 NIM : 016756513
 Program Studi : Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
 Judul TAPM : Analisis Ekonomi Kelembagaan Pengembangan Usaha Mina
 Pedesaan Perikanan Budidaya Di Kecamatan Kei Kecil
 Kabupaten Maluku Tenggara

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,
 Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Universitas
 Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juni 2014

Waktu : 16.35 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

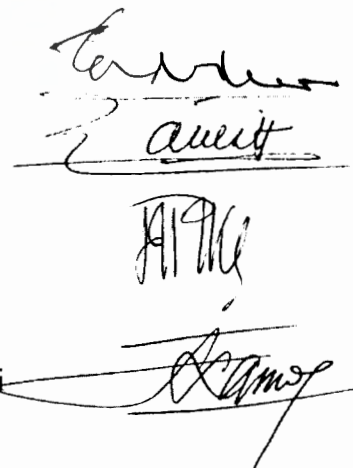
PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. C. B. Supartomo, M.Si

Penguji Ahli : Dr. Ir. J. Hiarey, M.Sc

Pembimbing I : Dr. Ir Sri Harijati, MA

Pembimbing II : Dr. Y. Lopulalan, S.Pi, M.Si



Handwritten signatures of the TAPM Panel members: Drs. C. B. Supartomo, M.Si; Dr. Ir. J. Hiarey, M.Sc; Dr. Ir Sri Harijati, MA; and Dr. Y. Lopulalan, S.Pi, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM dengan judul **“Analisis Ekonomi Kelembagaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara”**. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

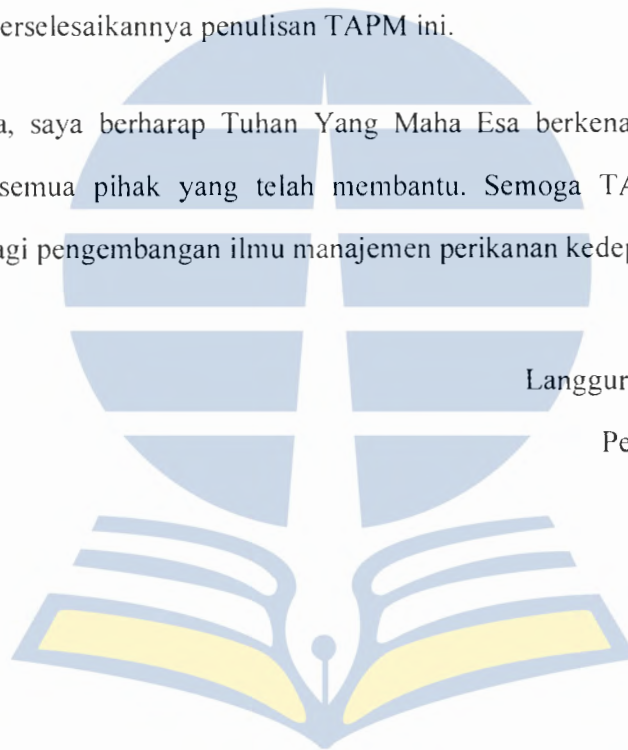
- (1). Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2). Dr. Y. Lopulalan, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir. Sri Harijati, MA selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (3). Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si selaku Kepala Bidang Program Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan selaku pengelola Program Pascasarjana di UT Pusat;
- (4). Drs. C. B Supartomo, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Ambon dan Drs. J. E. Ratlalan, M.Si selaku Pengelola S2 di UPBJJ-UT Ambon serta seluruh staf pengelola di UPBJJ-UT Ambon;
- (5). Ny. Sin Somnaikubun selaku Pengelola UPBJJ-UT Kabupaten Maluku Tenggara serta seluruh staf;

- (6). Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga dapat mengikuti Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan pada Universitas Terbuka;
- (7). Orang tua, Isteri, Anak dan Keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini;
- (8). Semua pihak yang telah membantu penulis baik pikiran, saran dan pendapat guna terselesaikannya penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen perikanan kedepannya

Langgur, Juni 2014

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	7
B. Kerangka Pikir Penelitian.	21
C. Definisi Operasional	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	26

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Metode Pengumpulan Data	26
D. Metode Pengambilan Sampel	28
E. Metode Analisa Data	28

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya.....	38
B. Karakteristik Rumah tangga Kelompok Pembudidaya.....	40
C. Tenaga Kerja	48
D. Sumber Pendapatan dan Jenis Pekerjaan Sampingan.....	48
E. Deskripsi Teknis Budidaya Rumput Laut.....	49
F. Konsep Kerjasama Kelembagaan PUMP-PB.....	58
G. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan PUMP-PB.....	74
H. Bentuk dan Strategi Kerjasama Kelembagaan PUMP-PB ...	86
I. KinerjaKelembagaan PUMP-PB.....	90

BAB. VI. PENUTUP

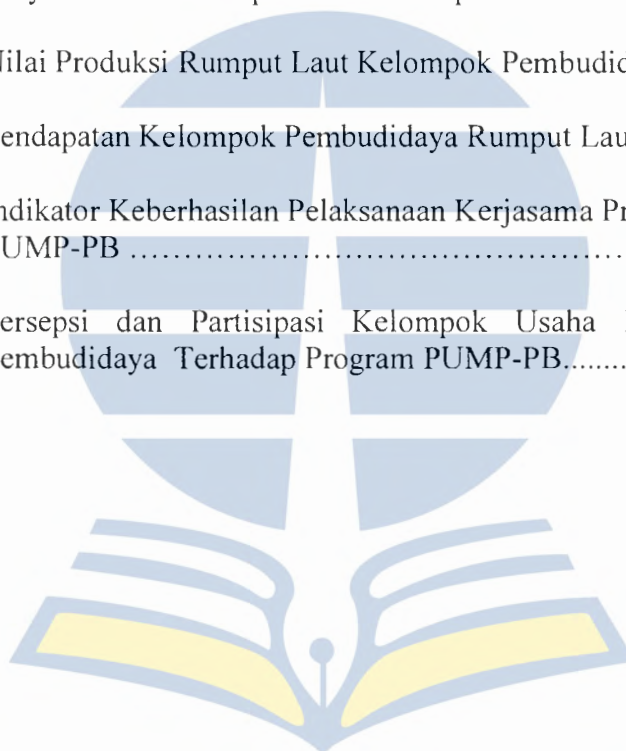
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	107
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
4.1	Kelompok Pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil 2011 ...	40
4.2	Aturan Main Dalam Kelembagaan PUMP-PB.....	60
4.3	Produksi Rumput Laut Kelompok Pembudidaya.....	90
4.4	Biaya Produksi Rumput Laut Kelompok Pembudidaya....	91
4.5	Nilai Produksi Rumput Laut Kelompok Pembudidaya	91
4.6	Pendapatan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut.....	92
4.7	Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Kerjasama Program PUMP-PB	96
4.8	Persepsi dan Partisipasi Kelompok Usaha Bersama Pembudidaya Terhadap Program PUMP-PB.....	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	25
3.1	Spektrum kontinum dari kemungkinan bentuk-bentuk organisasi ekonomi mulai dari sistem pasar sampai kepada organisasi berhirarki secara terintegrasi vertikal ..	34
4.1	Pola Dasar Pelaksanaan PUMP-PB	41
4.2	Kisaran Umur Pembudidaya rumputlaut di Kecamatan Kei Kecil program PUMP-PB.....	42
4.3	Tingkat Pendidikan Pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil program PUMP-PB	44
4.4	Tanggungun Keluarga Kelompok Pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil program PUMP-PB.....	46
4.5	Pengalaman Usaha Kelompok Pembudidaya Rumput Laut di Kecamatan Kei Kecil program PUMP-PB	47
4.6	Ilustrasi Konstruksi <i>Long Line</i> (Tampak Atas dan Samping).....	52
4.7	Organisasi Pelaksana PUMP-PB	66
4.8	Struktur Organisasi Kelompok Usaha Bersama program PUMP-PB	70
4.9	Alur Pembinaan dan Pengendalian PUMP-PB	79
4.10	Alur Pelaporan PUMP-PB	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Karakteristik Responden.....	110
2	Biaya Investasi untuk satu unit Usaha Budidaya Rumput Laut KUB program PUMP-PB.....	110
3	Pendapatan per periode produksi KUB program PUMP-PB.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 – 2014 adalah menjadikan Indonesia penghasil produk perikanan dan kelautan terbesar didunia pada tahun 2015 (KKP, 2010) dengan target kenaikan produksi sebesar 353 persen (DJPB, 2010). Sub sektor perikanan budidaya dianggap sebagai alternatif logis bagi tercapainya visi tersebut mengingat perikanan tangkap telah mengalami gejala *overfishing* pada hampir seluruh perairan Barat Indonesia, kecuali bagian barat Sumatera dan selatan Jawa (Dianthani dkk., 2008). Dari sekian banyak potensi komoditas perikanan budidaya, KKP menentukan setidaknya 4 komoditas unggulan yakni rumput laut, lele, bandeng dan kerapu (TROBOS, 2010). Khusus untuk rumput laut ditargetkan terjadi peningkatan produksi dari 3, 1 juta ton pada tahun 2009 menjadi 10 juta ton pada tahun 2014 (Nikijuluw, 2010).

Rumput Laut (*Seaweed*) merupakan salah satu komoditas yang mudah dibudidayakan dengan investasi murah dan margin keuntungan yang besar. Rumput laut digunakan secara luas dalam berbagai industri seperti industri pangan, kosmetik, cat, farmasi, tekstil dan keramik (DJPB, 2007), mengandung senyawa anti oksidan untuk mencegah penyakit kanker dan menurunkan kadar kolesterol (Arabei, 2000), disamping itu beberapa species *Red Algae* dapat dijadikan alternatif bahan baku kertas (You *et al.*, 2010), *bio fuel* dan bahkan rumput laut telah diketahui sebagai pereduksi pemanasan global yang efektif (Oak *et al.* 2010). Keunggulan-keunggulan

tersebut semakin mengukuhkan komoditas ini sebagai komoditas non kuota yang pasaran dan perannya diyakini takkan pernah mati.

Ditinjau dari aspek pangsa pasar maka komoditas ini memiliki akses pasar global yang luas mengingat kebutuhan dunia akan rumput laut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan pertengahan 2007 Indonesia telah mengekspor produk rumput laut ke lebih 30 negara di dunia (DJPB, 2007). Permintaan pasar dunia pada tahun 2009 dan 2010 diperkirakan mencapai sebesar 98,9 – 109 ribu ton sedangkan pasar dalam negeri setiap tahunnya membutuhkan pasokan sebesar 1.600 ton – 2.880 ton (BI, 2009).

Dahuri (2008) memperkirakan rumput laut dengan segenap produk hilirnya dapat menghasilkan devisa lebih besar dari US\$ 8 milyar/tahun dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 2 juta orang. Lebih lanjut dikatakan, dibalik prospek bisnis (ekonomi) perikanan budidaya, termasuk rumput laut yang sangat menjanjikan pada kenyataannya masih banyak permasalahan dan kendala yang bukan saja menghambat, tetapi juga dapat mengancam kelestarian (*sustainability*) dan keuntungan (*profitability*) usaha ekonomi ini. Salah satunya adalah ketidaksinkronan (*missmatch*) antara produsen dan konsumen (pasar) baik secara spatial (lokasi) maupun temporal (waktu) masih menjadi persoalan klasik yang belum terpecahkan secara tuntas.

Sebagai daerah kepulauan, perairan Maluku sangat tepat untuk dijadikan lokasi budidaya rumput laut. Secara umum, perairan Maluku memenuhi syarat karena airnya jernih, bersih dan bebas polusi. Dasar perairan yang didominasi campuran batu, karang dan pasir sangat penting sebagai persyaratan utama lokasi

budidaya. Kecepatan arus dengan kisaran 25 - 50 m/menit memungkinkan sirkulasi unsur hara yang mempercepat pertumbuhan rumput laut (Indriani dan Suminarsih, 2003 *diacu dalam* Kantor BI Ambon, 2007). Hal ini turut didukung oleh kebijakan pemerintah Provinsi Maluku yang telah menjadikan rumput laut sebagai komoditas unggulan yang akan terus dikembangkan (Pemprov Maluku, 2010).

Pengembangan komoditas rumput laut di Provinsi Maluku diharapkan dapat mengakselerasi berbagai kecenderungan laju peningkatan pembangunan sekaligus mendorong pencapaian target-target pembangunan di tingkat nasional. Terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai yakni: (1) Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; (2) Mempersiapkan percepatan pembangunan ekonomi Maluku melalui pengembangan sektor unggulan (*leading sector*) yang diharapkan memiliki daya pengganda (*multiplier effect*) secara sektoral maupun spasial (Pemprov Maluku, 2010).

Kegiatan budidaya rumput laut tidak banyak menuntut tingkat keterampilan tinggi dan modal yang besar, sehingga dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga nelayan termasuk ibu rumah tangga dan anak-anak (Puslitbangkan, 1990). Di Kabupaten Maluku Tenggara usaha budidaya rumput menerapkan sistem *long line* atau rawai, salah satu metode lepas dasar (*off bottom method*), menggunakan bentangan tali terapung yang dilengkapi dengan pelampung.

Beberapa kendala yang menjadi permasalahan pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Maluku Tenggara pada khususnya adalah pada tingkatan makro regional yaitu : (1) Pasar internal yang kecil (*small internal market*); (2) Skala ekonomi yang tidak mencukupi (*diseconomic of scale*);

(3) Ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*); Kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintah; (4) Kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintah; (5) Halangan dalam perdagangan internasional (*entry barrier*) dan (6) Keterbatasan kemampuan daerah baik dari APBN maupun APBD. Sedangkan di tingkat mikro hambatan yang sering dikeluhkan oleh pembudidaya adalah : (1) Kesulitan memasarkan hasil; (2) Kesulitan untuk mengakses modal (3) Kurangnya kemampuan manajemen usaha; (4) Tingginya biaya variabel sehingga produk yang dijual kurang berdaya saing; (5) Rendahnya harga jual dan (6) Kesulitan memperoleh tenaga kerja yang berkualitas (Pemprov Maluku, 2010).

Sehubungan dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah pesisir yaitu Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan melalui suatu pola dari pelaksanaan program PNPM-MKP melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan budidaya sesuai dengan potensi desa dan masyarakatnya. Melalui program ini masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai kebebasan untuk memilih, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah kelompok.

Intervensi pemerintah dalam membantu nelayan dalam berbagai bantuan yang diberikan lewat program "kredit usaha kecil", dan bantuan dari berbagai instansi dalam bentuk modal kerja dan investasi bagi nelayan khususnya perikanan budidaya guna memberdayakan nelayan di Kabupaten Maluku Tenggara, belum

sepenuhnya memberikan hasil yang memadai. Kerjasama yang berlangsung belum juga memberikan solusi yang jitu bagi peningkatan kesejahteraan nelayan termasuk pembudidaya di wilayah ini. Untuk mengatasi berbagai kondisi ini maka kehadiran Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang diprakarsai oleh kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kerjasama dengan nelayan Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil diharapkan menjadi solusi bagi upaya memberdayakan pembudidaya tersebut.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana konsep pengembangan dan implementasi kelembagaan Program Pengembangan Usaha Pedesaan dalam pemberdayaan pembudidaya?
2. Faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan kelembagaan PUMP dalam pemberdayaan pembudidaya?

Pertanyaan di atas perlu untuk ditelaah, karena penelitian untuk mengkaji kerjasama kelembagaan pemerintah dengan nelayan pembudidaya secara komprehensif belum dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting karena untuk mendesain program kerjasama di masa datang perlu ditopang oleh pengetahuan dasar yang memadai mengenai sebab-sebab kegagalan masa lalu, sehingga akan menjadi pedoman bagi memperbaikinya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah mengevaluasi dari sudut pandang ekonomi kelembagaan PUMP-PB bagi pemberdayaa pembudidaya rumput laut.

Secara khusus tujuan yang ingin diteliti meliputi:

1. Menganalisis konsep dan mekanisme pelaksanaan kelembagaan PUMP-PB dalam pemberdayaan pembudidaya.
2. Mengidentifikasi bentuk dan strategi kelembagaan PUMP-PB dalam pemberdayaan pembudidaya.
3. Mengukur kinerja kelembagaan PUMP dalam pemberdayaan pembudidaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta upaya mencari kebenaran ilmiah yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pemberdayaan pembudidaya.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Maluku Tenggara dan instansi terkait dalam merumuskan konsep dan strategi penguatan kapasitas kelembagaan yang mampu mendorong upaya pemberdayaan nelayan khususnya pembudidaya.
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperluas wawasan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut tentang Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-PB).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori-teori yang melandasi penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

I. Kelembagaan

Kelembagaan adalah suatu aturan yang dikenal atau diikuti secara baik oleh anggota masyarakat, yang memberi naungan (*liberty*) dan meminimalkan hambatan (*constraints*) bagi individu atau anggota masyarakat. Kelembagaan kadang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi kelembagaan juga tidak ditulis secara formal seperti aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan itu umumnya dapat diprediksi dan cukup stabil serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang (Wiratno dan Tarigan, 2002).

Kelembagaan merupakan fenomena sosial ekonomi berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pelaku interaksi sosial ekonomi mencakup dinamika aturan-aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para pelaku interaksi, disertai dengan analisis mengenai hasil akhir yang diperoleh dari interaksi yang terjadi (Hendayana dan Wally, 2003).

Menurut bapak ekonomi kelembagaan (*the patron saint*) Thorstein Veblen, kelembagaan adalah *settled habits of thought common to the generality of men*. Kelembagaan dianggap sebagai suatu konvensi atau suatu keteraturan dalam tingkah laku manusia yang menghasilkan suatu tingkat kepastian prediksi dalam hubungan antar manusia. Walaupun kelembagaan (sosial) sangat peduli pada pemecahan

masalah-masalah koordinasi sosial, kelembagaan tidak mesti mengawasi dirinya sendiri. Kelembagaan mungkin perlu otoritas *eksternal*, seperti negara, untuk menegakkan konvensi dan kebiasaan di atas, karena seseorang dapat saja mempunyai *insentif* untuk mencari hak-hak orang lain.

Wiratno dan Tarigan (2002) secara tegas mengatakan kelembagaan itu adalah serangkaian hubungan keteraturan (*order relationship*) antara beberapa orang yang menentukan hak, kewajiban atau tepatnya kewajiban menghargai orang lain, *privilis* dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut. Kelembagaan dicirikan oleh tiga hal yaitu:

- (1) *Property right*: mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban yang didefinisikan dan diatur oleh hukum, adat dan tradisi serta konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Dalam bentuk formal *property right* merupakan produk dari sistem hukum formal. Dalam bentuk lainnya merupakan produk dari tradisi atau adat kebiasaan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu tidak seorangpun yang dapat mengatakan hak milik tanpa pengesahan dari masyarakat di mana ia berada. Implikasi dari hal ini adalah: (1). hak seseorang adalah kewajiban orang lain, (2) hak seperti dicerminkan oleh kepemilikan adalah sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap hak miliknya. Hak tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti memberi, pembelian atau hadiah dan melalui pengaturan administrasi, misalnya pemerintah memberikan subsidi kepada sekelompok masyarakat. Memiliki *property right* berarti memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penggunaan sumberdaya untuk

menciptakan ongkos bagi orang lain apabila menginginkan sumberdaya yang dimiliki tersebut.

(2) *Batas yuridiksi*. Menentukan sikap dan apa yang tercakup dalam kelembagaan suatu masyarakat. Konsep batas *yuridiksi* dapat berarti batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu kelembagaan. Sehingga terkandung makna batas *yuridiksi* berperan dalam mengatur alokasi sumberdaya alam.

(3) *Aturan Representasi*.

Mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumberdaya yang dibicarakan. Keputusan apa yang akan diambil dan apa akibatnya terhadap *performance* akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Aturan representasi menentukan jenis keputusan yang dibuat, oleh karena itu berperan penting dalam menentukan alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka. Hal ini memberi pemahaman bahwa aturan representasi merupakan subjek analisis ekonomi.

Dahuri *et al.* (2001) mengatakan kelembagaan sebagai institusi, terdiri dari tiga aspek yaitu : 1) aparatur yang bekerja di lembaga tersebut, 2) fasilitas ruang, peralatan dan bahan, serta fasilitas lainnya untuk mengoperasikan lembaga, dan 3) dana operasional untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut. Sedangkan pelembagaan nilai-nilai adalah memasyarakatkan hasil yang dikerjakan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat atau pengguna jasa lembaga tersebut. Nilai-nilai yang dilembagakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah,

tataruang wilayah pesisir dan lautan, pedoman perencanaan dan bentuk-bentuk lainnya.

Pranadji (2003) mengatakan bahwa dalam kenyataan penganalisaan kelembagaan belum banyak menyentuh substansi yang berimplikasi besar terhadap kemajuan masyarakat di pedesaan. Aspek kelembagaan, misalnya menyangkut pengembangan tata nilai, kepemimpinan dan perubahan struktur sosial masih jarang diteliti secara mendalam. Akibatnya implikasi penelitian kelembagaan yang selama ini diusulkan tidak lebih dari sekedar sebagai embel-embel atau pemanis untuk pembelaan diri terhadap kegagalan penyelenggaraan pembangunan pedesaan. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian kelembagaan dengan basis pengetahuan sosiologi, hendaknya mulai dikembangkan lebih serius. Pilihan strategi yang digunakan dalam pembangunan itu sendiri sarat dengan aspek kelembagaan, misalnya dalam kaitan dengan aspek tata nilai, kepemimpinan, manajemen sosial dan interpedensi antara pelaku pembangunan pedesaan.

Teori *principal-agent* berusaha untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam keterhubungan (*interrelationship*) antara dua atau lebih individu atau kelompok, dan membantu menerangkan bagaimana keterikatan pihak yang berhubungan dapat dilaksanakan secara kompatibel dengan upaya meminimalisasi biaya transaksi. Dalam bentuk paling sederhana, teori "*principal-agent*" menyangkut hubungan antara dua orang, yang satu dinamakan prinsipal dan lainnya dinamakan agen.

Anwar (1995) menyatakan bahwa teori *principal-agent* menekankan perhatiannya terhadap suatu rancangan struktur insentif untuk suatu tujuan efisiensi

pada keadaan yang asimetrik (*asimetrik information*). Tatanan kontraktual (*contractual arrangement*) merupakan solusi dari hubungan ini yang membawa agen kedalam suatu bentuk kerjasama dengan prinsipal. Prinsipal setuju memberikan suatu insentif tertentu kepada agen, di lain pihak agen setuju melakukan tindakan atas nama dan yang menjadi kepentingan prinsipal. Teori ini membantu dalam mendekati masalah yang dihadapi oleh petani/nelayan dalam hubungannya dengan kelembagaan yang dipilihnya. Yang menjadi permasalahan utama dalam teori "principal-agent" ini adalah bagaimana prinsipal dapat meyakinkan agen untuk menerima rencana/program yang akan dilaksanakan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Perlunya suatu persetujuan di antara kedua belah pihak dalam suatu hubungan principal-agent ini didasarkan atas fakta bahwa prinsipal dan agen sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda. Keadaan demikian selanjutnya akan mengakibatkan suatu konflik oleh karena setiap individu akan memaksimalkan kepuasannya, yang selanjutnya agen akan cenderung bertindak menurut kepentingannya daripada mempertimbangkan kepentingan prinsipalnya. Sejalan dengan pendapat ini, Williamson (1985) menyatakan bahwa perilaku individu pada dasarnya bersifat oportunis dan cenderung dengan berbagai tipu muslihat mengejar kepentingannya sendiri. Dalam hal demikian, tidak adanya aturan main yang bisa membatasi, misalnya melalui kontrak yang dinyatakan secara eksplisit, maka agen akan cenderung mengejar keuntungan secara individu dan tidak akan mempertimbangkan kepentingan prinsipalnya dan demikian juga berlaku sebaliknya. Bentuk kelembagaan hubungan "*principal agent*" muncul sebagai respon terhadap

keadaan informasi yang *asimetri*, sehingga dalam hal ini bisa timbul masalah agensi (*agency problem*) yang selanjutnya menimbulkan biaya agensi (*agency cost*).

Priyatna dan Purnomo (2007) mengatakan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam upaya pengembangan kelembagaan kelompok nelayan. Langkah-langkah tersebut dapat dibagi menjadi: 1) Tahapan pembentukan dan penyusunan kelembagaan kelompok nelayan dilakukan pada lokasi-lokasi yang belum memiliki kelembagaan lokal. Pada tahapan ini, inisiasi umumnya dilakukan oleh pihak luar, yaitu melalui pemerintah, akademisi maupun LSM. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pembentukan kelembagaan lokal adalah aspek representasi dan adatif. Proses penyusunannya melibatkan secara langsung seluruh *stakeholders* yang ada di lokasi. Keseluruhan *stakeholders* tersebut diberikan kesempatan untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya keberlangsungan usaha penangkapan ikan sekaligus sumberdaya-sumberdaya pendukungnya. 2) Tahapan Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dilakukan sebagai tahap lanjutan atau bagi lokasi yang telah memiliki kelembagaan lokal. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara pendampingan secara langsung kepada kelompok-kelompok yang sudah ada. 3) Tahapan pengembangan kelembagaan kelompok nelayan dilakukan sebagai tahap lanjutan dengan menggunakan teknik monitoring –umpan balik. Pada tahapan ini mengikuti alur bahwa awalnya manajemen kelembagaan dilakukan secara sederhana sehingga mudah dipahami. Peran kelembagaan kelompok nelayan semakin diperluas dengan peran pihak luar sebagai penyedia informasi dan pelayanan. Proses pengembangan jejaring antara kelembagaan kelompok nelayan dengan kelembagaan

kelompok lainnya difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini mengingat kegiatan perikanan tangkap juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan di luar perikanan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*. Menurut Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary*, yang dikutip oleh Haeruman dan Eryatno (2001), kata *empower* mengandung dua pengertian: (1) *to give power to* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha memberi kemampuan.

Tampubolon *et al.* (2006) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan lahir dari kata bahasa Inggris yaitu "empower" yang artinya "memberi kuasa atau wewenang kepada". Konsep ini berkembang sejak Tahun 1980-an dan digunakan oleh agen-agen pembangunan hingga sekarang. Hal ini menyebabkan pemberdayaan menjadi jargon yang sangat populer di kalangan para agen pembanguan masyarakat, khususnya dalam penanganan kemiskinan. Pengertian pemberdayaan sesungguhnya sangat tergantung pada konteksnya. Pemberdayaan secara sederhana dapat disrtikan sebagai pemberian "power: stsu kekuasaan atau kekuatan atau daya kepada kelompok yang lemah sehingga merek memikiki kekuatan untuk berbuat.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistim yang

mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Pada dasarnya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Haeruman dan Eryatno, 2001)

Suredjo (2005) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumberdaya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pada prinsipnya masyarakat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka, lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Aktivitas ini kemudian menjadi basis program lokal, regional bahkan nasional. Target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termarjinalkan dalam masyarakat, termasuk wanita. Namun demikian, hal ini tidak menafikan partisipasi dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses ketimbang sebuah pendekatan cetak biru. Selanjutnya dikatakan bahwa mengembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang makin langka. Pendekatan ini akan meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah)

terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja staf pemerintah dan kepuasan pelanggan atas pelayanan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang dan budaya tertentu. Sebagai contoh upaya pemberdayaan pada masyarakat petani tidak sama dengan pemberdayaan pada masyarakat nelayan, walaupun tujuan pemberdayaan adalah sama. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi termasuk sosial budaya setempat. Selama ini para perencana pembangunan senagtiasa bias dalam memandang komunitas masyarakat. Komunitas nelayan seringkali diperlakukan sama dengan petani atau kelompok masyarakat lain. Walaupun pada hakekatnya perikanan dapat dilihat sebagai bagian dari pertanian, tetapi jika dilihat dari sistem mata pencaharian menunjukkan perbedaan yang berarti. Sebagai gambaran pemilikan alat produksi pada perikanan seperti modal dan peralatan penangkapan ikan, cenderung dikuasai oleh tengkulak, sementara dibidang pertanian, lahan pertanian dan modal dikuasai oleh tuan tanah (Sumaryadi, 2005).

Satria (2002) mengatakan bahwa topik pemberdayaan nelayan penting dikaji untuk mengatasi problem besar nelayan, kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan, dan keterasingan. Hal tersebut merupakan ironi karena terjadi justru ditengah masyarakat yang bekerja mencari sumberdaya yang melimpah. Untuk itu memang tidak ada jalan lain kecuali mengeluarkan nelayan dari perangkap keterbelakangan

seperti itu. Kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana melakukan pemberdayaan yang efektif sehingga nelayan dapat mengalami mobilitas vertikal sekaligus keluar dari jebakan-jebakan yang memarjinalkan posisinya. Formulasi konsep pemberdayaan tersebut sulit dilakukan tanpa pemahaman tentang pergeseran paradigma pembangunan yang melatarbelakangi munculnya gagasan pemberdayaan serta pemahaman tentang karakteristik sosial nelayan suatu kelompok manusia yang akan diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat nelayan, paling tidak memiliki dua dimensi pokok yaitu: (1) dimensi kultural mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi dan kebiasaan-kebiasaan. Pemberdayaan kultural ini diperlukan untuk mengatasi kemiskinan kultural, seperti pola hidup konsumtif, rendahnya kemampuan menabung, sikap subsisten, atau resisten terhadap pendidikan formal. (2) dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan struktural tersebut berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Disini tidak ada pretensi untuk selalu membentuk koperasi nelayan karena betapapun bentuk organisasi yang ada, jaminan kepentingan sosial ekonomi nelayan adalah hal yang paling penting. Kehadiran organisasi tersebut yang dijalankan sesuai tingkat budaya organisasi nelayan setempat diharapkan juga menjadi institusi alternatif, selain institusi patron-klien seperti selama ini telah mengakar.

Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subyek yang berkompeten, dimana mereka harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen yang

dapat mempengaruhi perubahan, juga masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri dan diatas semuanya itu tingkat kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

3. Terminologi dan Deskripsi Rumput Laut

Istilah rumput laut (*seaweed*) berbeda dengan komunitas rumput laut atau lamun (*seagrass*). Lamun dimasukkan kedalam kedalam kelompok tumbuhan berbunga (*Anthophyta*). Rumput laut didefinisikan sebagai tumbuhan dasar perairan yang dikenal sebagai alga. Istilah rumput laut itu sendiri bukanlah istilah taksonomik, melainkan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan sejumlah alga laut ukuran besar yang masuk dalam kelompok *Chlorophyceae* (alga hijau), *Rhodophyceae* (alga merah) dan *Phaeophyceae* (alga coklat). Alga tersebut berbeda dengan tumbuhan tingkat tinggi, dimana mereka tidak mempunyai akar, batang dan daun sejati.

Genus *Eucheuma* merupakan istilah populer dibidang niaga untuk jenis rumput laut penghasil karaginan. Nama istilah ini resmi bagi species *Eucheuma* yang ditentukan berdasarkan kajian filogenetis dan tipe karaginan yang terkandung didalamnya. Jenis *Eucheuma* ini juga dikenal dengan *Kappaphycus* (Ditjenkan Budidaya, 2004).

Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut merah (*Rhodophyceae*) dan berubah nama menjadi *Kappaphycus alvarezii* karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi *kappa*-karaginan. Nama daerah *cottonii* umumnya

lebih dikenal dan biasa dipakai dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional. Klasifikasi *Eucheuma cottonii* menurut Doty (1988) adalah sebagai berikut :

Kelas : *Rhodophyceae*

Ordo : *Gigartinales*

Famili : *Solieracea*

Genus : *Eucheuma*

Species : *Eucheuma cottonii*

Ciri fisik *Eucheuma cottonii* adalah mempunyai thallus silindris, permukaan licin, cartilogeneus. Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. Kejadian ini merupakan suatu proses adaptasi kromatik yaitu penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan. Penampakan thalli bervariasi mulai dari bentuk sederhana sampai kompleks. Duri-duri pada thallus runcing memanjang, agak jarang-jarang dan tidak bersusun melingkari thallus. Percabangan ke berbagai arah dengan batang-batang utama keluar saling berdekatan ke daerah basal (pangkal). Tumbuh melekat ke substrat dengan alat perekat berupa cakram (Ditjenkan Budidaya 2004; Damandiri, 2008).

4. Budidaya Rumput Laut

Pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia dirintis sejak tahun 1980-an dalam upaya merubah kebiasaan penduduk pesisir dari pengambilan sumberdaya alam ke arah budidaya rumput laut yang ramah lingkungan dan usaha budidaya ini

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya juga dapat digunakan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan perairan pantai (Ditjenkan Budidaya, 2004).

Departemen Kelautan dan Perikanan (2005), mengemukakan bahwa pengembangan budidaya rumput laut merupakan salah satu alternatif pemberdayaan masyarakat pesisir yang mempunyai keunggulan dalam hal:

- ✓ Produk yang dihasilkan mempunyai kegunaan yang beragam
- ✓ Tersedianya lahan untuk budidaya yang cukup luas
- ✓ Mudahnya teknologi budidaya yang diperlukan

Rumput laut oleh Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan yang dijadikan sebagai sasaran revitalisasi selain udang dan tuna. Rumput laut dipilih sebagai komoditas unggulan karena memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, teknologi budidaya yang mudah, masa tanam yang pendek (hanya 45 hari) atau *quick yield* dan biaya per unit produksi sangat murah. Rumput laut merupakan komoditas yang cocok untuk dikembangkan karena bisa menjadi alternatif mata pencarian bagi nelayan yang kesulitan melaut karena kenaikan biaya BBM.

Secara ekologi, komoditas rumput laut memberikan banyak manfaat terhadap lingkungan sekitarnya antara lain adalah dapat mengkonservasi lahan pesisir terhadap berbagai aktivitas penangkapan yang tidak berwawasan lingkungan, seperti penggunaan racun/bom untuk penangkapan ikan. Secara biologis, rumput laut memegang peranan sebagai produsen primer penghasil bahan organik dan oksigen di lingkungan perairan. Dari segi ekonomi, merupakan komoditas yang potensial untuk

dikembangkan mengingat nilai gizi yang dikandungnya. Selain itu, rumput laut dapat dijadikan sebagai bahan makanan seperti agar-agar, sayuran, kue dan menghasilkan bahan algin, karaginan dan fluseran yang digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, tekstil, dan lain sebagainya (Amin, *dkk.*, 2005).

Secara umum di Indonesia, budidaya rumput laut dilakukan dalam tiga metode penanaman berdasarkan posisi tanaman terhadap dasar perairan. Ketiga metode penanaman rumput laut tersebut (Ditjenkan Budidaya 2004; Kolang *dkk.*, 1996) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Metode dasar (*bottom method*)

Penanaman dengan metode ini dilakukan dengan mengikat bibit tanaman yang telah dipotong pada karang atau balok semen kemudian disebar pada dasar perairan. Metode dasar merupakan metode pembudidayaan rumput laut yang menggunakan bibit dengan berat tertentu.

b) Metode lepas dasar (*off-bottom method*)

Metode ini dapat dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir, sehingga mudah untuk menancapkan patok/pancang. Metode ini sulit dilakukan pada dasar perairan yang berkarang. Bibit diikat dengan tali rafia yang kemudian diikatkan pada tali plastik yang direntangkan pada pokok kayu atau bambu. Bibit yang akan ditanam berukuran 100 – 150 gram, dengan jarak tanam 20 – 25 cm. Penanaman dapat pula dilakukan dengan jaring yang berukuran 2,5 x 5 m² dengan lebar mata jarring 25 – 30 cm dan direntangkan pada patok kemudian bibit rumput laut diikatkan pada simpul-simpulnya.

c) Metode Apung (*floating method*)

Metode ini cocok untuk perairan dengan dasar perairan yang berkarang dan pergerakan airnya didominasi oleh ombak. Penanaman menggunakan rakit-rakit bambu sedang dengan ukuran tiap rakit bervariasi tergantung dari ketersediaan material, tetapi umumnya $2,5 \times 5 \text{ m}^2$ untuk memudahkan pemeliharaan. Pada dasarnya metode ini sama dengan metode lepas dasar hanya posisi tanaman terapung dipermukaan mengikuti gerakan pasang surut. Untuk mempertahankan agar rakit tidak hanyut digunakan pemberat dari batu atau jangkar. Untuk menghemat area, beberapa rakit dapat dijadikan menjadi satu dan tiap rakit diberi jarak 1 meter untuk memudahkan dalam pemeliharaan. Bibit diikatkan pada tali plastik dan atau pada masing-masing simpul jaring yang telah direntangkan pada rakit tersebut dengan ukuran berkisar antara 100 – 150 gram.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Ketersediaan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh perairan sekitar perairan Kabupaten Maluku Tenggara, belum didukung sepenuhnya oleh kemampuan sumberdaya manusia yang cukup dan dapat mengelolanya dengan baik. Penguasaan teknologi dan manajemen di bidang perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Kecamatan Kei Kecil masih belum cukup untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang tersedia. Di lain sisi ketersediaan modal untuk menggairahkan kegiatan ekonomi dibidang perikanan dan kelautan juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Penguasaan pengetahuan dan ketrampilan usaha masyarakat yang mendiami pesisir Kecamatan

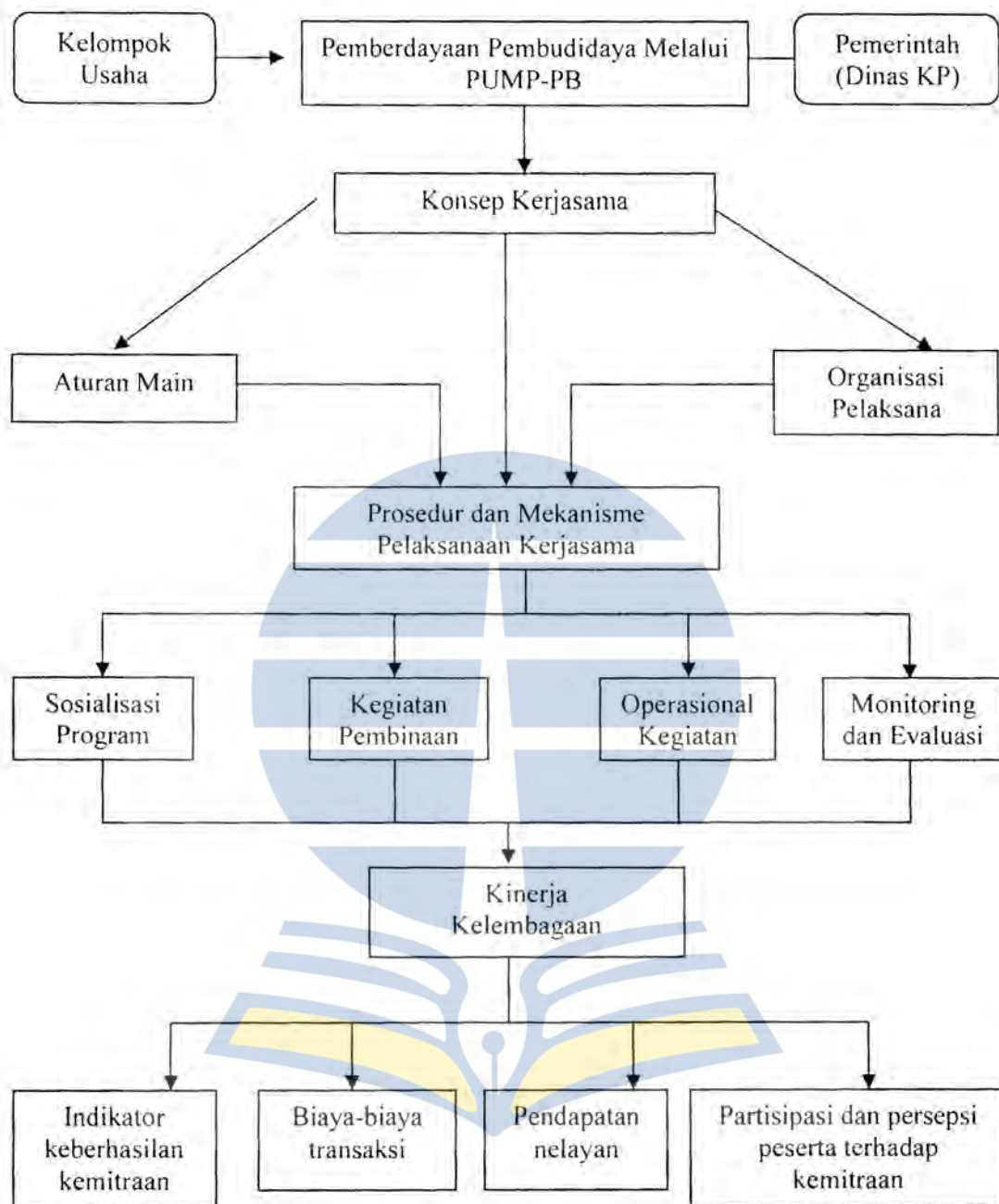
Kei Kecil masih bersifat tradisional dan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Berbagai upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala ini, antara lain dengan penyediaan fasilitas kredit oleh pemerintah daerah melalui lembaga perbankan. Namun akses nelayan kecil untuk memperoleh bantuan modal sangat terbatas, diikuti pula oleh berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi oleh nelayan seperti tingkat suku bunga yang tinggi. Kehadiran program PUMP-PB melalui kerjasama yang dibangun oleh dinas kelautan dan perikanan adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan nelayan di kota ini.

Berkaitan dengan kehadiran program PUMP-PB melalui kerjasama usaha yang dibangun, adalah merupakan hal yang mesti menjadi pemahaman awal dari setiap komponen yang terlibat adalah konsep kerjasama. Hal ini menjadi *urgen* untuk dipahami oleh setiap *stakeholders* yang terlibat dalam program ini, agar dalam implementasinya dapat dilaksanakan secara tepat. Konsep kerjasama yang dirumuskan berdasarkan pada aturan main dan organisasi pelaksanaannya. Aturan main merupakan landasan hukum yang mengarahkan berbagai *stakeholders* yang terlibat di dalamnya, sementara organisasi pelaksana berperan dalam mengatur *job description* dari setiap orang, agar mereka memahami tugas dan tanggungjawabnya.

Aturan main dan organisasi pelaksana dari konsep kemitraan yang dibangun, tentunya akan menciptakan prosedur dan mekanisme pelaksanaan kemitraan yang baik. Implementasi dari program kerjasama tersebut tidak akan berlangsung secara baik jika proses sosialisasi tidak berlangsung secara teratur, proses pembinaan yang

kontinu dan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada berbagai tahapan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam program tersebut, agar dapat diambil langkah-langkah strategis untuk perbaikannya pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Dengan adanya prosedur dan mekanisme pelaksanaan kerjasama yang baik, akan memberikan dampak positif terhadap kinerja kemitraan. Komponen yang menjadi penentu terhadap kinerja kemitraan tercermin dari pendapatan kelompok masyarakat pembudidaya dalam hal ini kelompok pembudidaya yang akan meningkat, biaya-biaya transaksi yang terjadi dalam program kerjasama tersebut dan kriteria keberhasilannya serta partisipasi dan persepsi nelayan terhadap kerjasama tersebut. Persepsi dan partisipasi dari pembudidaya peserta program PUMP-PB dapat bersifat positif maupun negatif dan berubah-ubah sesuai kondisi atau perkembangannya. Perbedaan persepsi dan partisipasi pembudidaya peserta program PUMP-PB terhadap paket bantuan yang diberikan (penyaluran saran produksi, pelatihan dan pembimbingan) ternyata akan berdampak pada tingkat pendapatannya.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

C. Definisi Operasional

Batasan dan lingkup penelitian ini dirumuskan dalam definisi operasional berikut ini:

1. Kelembagaan PUMP-PB adalah institusi pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil.
2. Pemberdayaan adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat di Kecamatan Kei Kecil yang melakukan aktivitas budiday rumput laut.
3. Kinerja kelembagaan PUMP-PB adalah tingkatan kerja lembaga PUMP-PB di Kecamatan Kei Kecil yang dilihat dari faktor: tingkat pendapatan, biaya transaksi, indikator keberhasilan serta partisipasi dan persepsi peserta.
4. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan PUMP-PB adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PUMP-PB meliputi sosialisasi program, operasional kegiatan, kegiatan pembinaan serta monitoring dan evaluasi.
5. Bentuk dan strategi kelembagaan PUMP-PB adalah pola kerjasama dalam pelaksanaan proram PUMP-PB, meliputi integrasi vertikal, koordinasi kooperatif formal, koordinasi aliansi strategis, dan koordinasi sistem kontrak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *survey descriptive* (deskriptif survei). Desain penelitian untuk menjawab ketiga tujuan dari penelitian ini didekati dengan deskriptif survei, yakni mendapat gambaran tentang suatu fenomena, fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara sistematis, faktual dan cermat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dengan mempertimbangkan bahwa kecamatan ini berada di gugusan pulau kecil yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, yang juga merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara yang mendapatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir berupa Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari pertengahan bulan Juli sampai dengan September Tahun 2012.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode survei, yaitu dengan mewawancarai keseluruhan responden yang menjadi sampel penelitian

dengan maksud memperoleh gambaran empirik mengenai fokus dan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan/kuisisioner dengan kelompok masyarakat budidaya rumput laut dan TIM teknis.
2. Data sekunder diperoleh melalui publikasi instansi-instansi terkait dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan substansi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dokumentasi dan triangulasi. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Sasaran yang ingin dicapai dalam observasi adalah mendapat gambaran secara umum tentang pokok kajian sebelum melakukan penelusuran secara sistimatis terhadap obyek penelitian, yaitu melalui penelusuran secara bertahap kepada beberapa *informan* tentang berbagai macam pelapisan dan pengelompokkan yang berada dalam objek penelitian. *Wawancara*, adalah teknik dalam penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh peneliti kepada responden dengan menggunakan kuisisioner. Wawancara terdiri atas *wawancara terstruktur* dengan panduan kuisisioner yang sifatnya tertutup dan terbuka. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data dari kelompok usaha bersama pembudidaya rumput laut (KUB). *Wawancara semi terstruktur* dengan mengacu pada beberapa pertanyaan kunci yang telah disiapkan, dengan kelompok sasarannya. *Dokumentasi*, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data berupa tulisan, gambar dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. *Triangulasi*, adalah teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

D. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode exhaustive sample, yakni metode pengambilan sample di mana keseluruhan populasi menjadi anggota sample. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok usaha bersama pembudiaya rumput laut (KUB). Berdasarkan KUB yang memperoleh dana hibah program PUMP-PB berjumlah 4 kelompok dengan jumlah populasi sebanyak 40 pembudidaya. Sehingga responden diambil yakni seluruh anggota populasi menjadi sampel yakni berjumlah 40 responden. Sedangkan responden untuk TIM teknis berjumlah 4 responden.

E. Metode Analisis Data

Terdapat empat analisis data dalam penelitian ini, yakni:

I. Analisis Konsep Kerjasama

Analisis ini ditujukan untuk menelaah tentang aturan main dan sistem organisasi dari kelembagaan kerjasama program PUMP-PB. Metode analisis dilakukan secara deskriptif dengan penekanan pada aspek:

- Batas *juridiksi*, meliputi aturan main tentang kewenangan dari kelompok nelayan dan kelembagaan yang terlibat dalam kemitraan
- *Property right*, meliputi aturan main tentang lokasi penangkapan atau *fishing ground* dari nelayan, transaksi jual beli ikan, bantuan dan pembinaan untuk

pengembangan usaha kelompok nelayan. Sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap aturan main.

- Aturan representasi, meliputi struktur dan fungsi organisasi, forum-forum dialog, proses pengambilan keputusan, dan penanganan konflik.

2. Analisis Pelaksanaan Kerjasama

Analisis pada aspek ini ditujukan untuk menelaah mekanisme pelaksanaan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait dengan kerjasama program PUMP-PB dalam pemberdayaan pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil. Proses analisis dilaksanakan secara diskriptif terhadap tahapan-tahapan kegiatan yang terdiri atas proses sosialisasi, operasional kegiatan, kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut dianalisis berdasarkan kerangka kesesuaiannya dengan aturan main yang berlaku dan organisasi pelaksanaannya.

3. Analisis Bentuk dan Karakteristik Kerjasama

Pada tahapan ini proses analisis ditujukan untuk mengetahui bentuk organisasi ekonomi kerjasama dengan mengacu pada spektrum kontinum dari kemungkinan bentuk-bentuk organisasi ekonomi mulai dari sistim pasar hingga organisasi berhirarki secara terintegrasi vertikal.

Anwar (1997) menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya bersifat rasional, tetapi untuk melakukannya dia menghadapi keterbatasan terutama dalam kemampuannya memproses informasi. Oleh karena itu seringkali individu membuat keputusan tanpa mempertimbangkan semua alternatif yang mungkin terjadi. Dalam

kaitan dengan hal tersebut suatu organisasi atau kelembagaan sebenarnya dapat mengimbangi kekurangan manusia seperti dijelaskan di atas. Dalam hal ini kelembagaan berfungsi sebagai suatu unsur pendukung informasi yang merupakan wadah informasi untuk menyediakan pengetahuan dalam melakukan hubungan *interpersonal*.

Hobbs (1997) mengatakan bahwa kunci pemahaman terhadap ekonomi biaya transaksi adalah *ceteris paribus*, koordinasi vertikal antara tiap tahapan produksi, pengolahan dan rantai produksi akan berjalan pada keadaan biaya transaksi yang paling efisien. Selanjutnya dikatakan bahwa koordinasi vertikal dapat dipandang sebagai suatu kontinum yang dapat dikelompokkan dalam lima kategori koordinasi. Spektrum kontinum dari kemungkinan bentuk-bentuk organisasi ekonomi disajikan pada Gambar 3.1.

a. *Spot market*

Kategori ini dicirikan oleh koordinasi *invisible hand* melalui peranan harga sebagai pembawa informasi yang mencukupi. Koordinasi harga dalam *invisible hand* memungkinkan individu mengikuti kepentingannya sendiri-sendiri, bersifat jangka pendek, oportunistik, "*bounded rational*" dalam membagi informasi, bersifat *fleksibel* dan mempertahankan peranannya yang *independen*.

Pertukaran terjadi antar dua individu dengan landasan mekanisme pengendalian *ekternal* melalui harga yang secara umum diterima sebagai signal baku yang menentukan sifat ekonomi pertukaran. Dalam sistem persaingan sempurna tidak ada pihak yang memiliki kekuatan mempengaruhi harga sehingga pertukaran terjadi secara aktif. Sebaliknya dalam sistem persaingan tidak sempurna, seperti

pada keadaan monopoli atau monopsoni, salah satu pihak bisa menentukan harga dan menentukan pembagian manfaat pertukaran. Sifat sesungguhnya dari *spot market* adalah mekanisme pengendalian hampir seluruhnya dilakukan secara *eksternal* melalui sistem harga.

b. *Sistem kontrak.*

Bentuk kontraktual secara legal dapat dilaksanakan terhadap sistem dengan perincian yang spesifik sebagai persyaratan dari pertukaran. Dengan sistem kontrak tersebut, mekanisme untuk koordinasi bersifat internal pada hubungan-hubungan pertukaran. Pelaku yang terlibat dalam kontrak menyatakan persetujuannya secara internal tentang spesifikasi yang berhubungan dengan kontrak yang dibuat mereka. Hubungan pertukaran pada sistem kontrak sebagian masih dikendalikan secara *eksternal* oleh pihak ketiga yang mewakili sistem legal. Persyaratan-persyaratan yang telah disepakati secara *internal* akan menjadi standar yang bersifat *eksternal* dimana pelaku pertukaran harus berhadapan dengan kekuatan *enforcement* dari luar.

c. *Aliansi strategis*

Kategori ini merupakan hubungan pertukaran dimana individu atau kelompok yang terlibat menghadapi resiko dan keuntungan yang didasarkan dari suatu pencapaian tujuan bersama. Anwar (1997) mengemukakan bahwa organisasi tersebut bisa dikatakan sebagai suatu aliansi strategis harus menunjukkan tiga karakteristik, yaitu dapat diidentifikasi adanya tujuan bersama, pengendalian bersama dalam proses pengambilan keputusan dan menanggung resiko serta harapan keuntungan bersama. Dengan demikian mekanisme koordinasi dalam

aliansi strategis adalah adanya kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang terlibat bersama dalam persekutuan tersebut atau dapat dikatakan koordinasi muncul dari terjadinya pengendalian bersama (*mutual control*). Aliansi strategis dapat dipandang sebagai wilayah netral yang berbeda di antara pengendalian internal dengan pengendalian eksternal terhadap koordinasi.

d. *Koperasi formal*

Kategori ini memasukkan campuran yang berbeda dari bentuk-bentuk organisasi yang terlibat pada suatu komitmen kebersamaan antara beberapa pelaku dalam sistem hubungan pertukaran. Bentuk koperasi formal dicirikan oleh adanya struktur organisasi formal yang memungkinkan untuk melakukan pengendalian ke dalam (organisasi), sehingga kebijaksanaan dan prosedur dapat secara formal ditempatkan untuk melakukan pertukaran antara pihak-pihak yang melaksanakannya. Kunci dalam koperasi adalah terletak pada pengendalian internal pada organisasi itu dimana pengendaliannya terdesentralisasi kepada pihak-pihak pemilik dan pemilik koperasi mempertahankan identitasnya secara terpisah dimana apabila mereka tidak menginginkan suatu persyaratan pertukaran, mereka dapat keluar untuk menghindarinya menurut keinginan mereka.

e. *Integrasi vertikal*

Bentuk integrasi vertikal dalam kontinum ini merupakan mekanisme yang menyandarkan diri pada sistem koordinasi yang dilakukan secara terpusat dimana di dalamnya organisasinya mempunyai bentuk hirarki yang mempunyai batas-batas kewenangan tertentu yang mempunyai sistem pengaturan dalam suatu sistem

organisasi yang tunggal, tetapi tidak selalu berarti kepemilikan tunggal dari organisasi ini. Dengan demikian organisasi integral vertikal harus memenuhi persyaratan adanya pengambilan keputusan yang terpusat.

		Pilihan-pilihan strategi kearah koordinasi vertikal							
		Spot/Cash Market	Sistem kontrak	Strategi aliansi	Kooperasi formal	Integrasi vertikal			
Karakteristik koordinasi dari invisible hand	Kepentingan Sendiri							Kepentingan bersama	Karakteristik koordinasi yang dikelola
	Hubungan jangka pendek							Hubungan jangka panjang	
	Ketebatasan & perilaku oportunistik							Pembagian keuntungan	
	Keterbatasan distribusi informasi							Pembagian informasi terbuka	
	Lebih Fleksibel							Lebih stabil	
	Independen							Interpendensi	
		External via harga dan pembakuan kualitas	External via spesifikasi dan ikatan legal	Saling kontrol satu sama lain	Internal via struktur terdesentralisasi	Internal via struktur tersentralisasi			
		Sistem pengendalian							

Keterangan: Garis diagonal mencerminkan pencampuran (mixed) dari peranan harga sebagai "invisible hand" dalam spot market dan karakteristik organisasi yang dikelola secara koordinasi yang terdapat dalam kelima alternatif strategis ke arah koordinasi integrasi vertikal. Area di atas diagonal menunjukkan tentang taraf relatif dari karakteristik "invisible hand" dan area di bawah diagonal menunjukkan taraf relatif dari karakteristik integrasi vertikal yang dikelola

Gambar 3.1. Spektrum kontinum dari kemungkinan bentuk-bentuk organisasi ekonomi mulai dari sistem pasar sampai kepada organisasi berhirarki secara terintegrasi vertikal

Apabila kontinum di atas dikaitkan dengan pilihan nelayan pada pengembangan usahanya terlihat bahwa kelembagaan informal mengarah pada sistem kontrak, sementara kelembagaan formal lebih mengarah kepada sistem koperasi formal. Dengan pendekatan hubungan *principal-agent*, diduga bahwa dalam

sistem kontrak akan lebih kecil ditemuinya permasalahan agensi dibandingkan dengan kelembagaan formal. Pola koordinasi kelembagaan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi: 1). Koordinasi kelembagaan pada mitra 2). Koordinasi kelembagaan kelompok pembudiaya 3). Koordinasi kelembagaan TIM teknis dengan kelembagaan kelompok nelayan dan instansi terkait.

4. Analisis Kinerja Kelembagaan Kemitraan.

Kinerja kemitraan yang dianalisis meliputi: pendapatan nelayan, biaya transaksi, indikator keberhasilan, partisipasi dan persepsi partisipan.

(1) Pendapatan nelayan

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui rata-rata pendapatan nelayan peserta kemitraan dalam satu bulan. Harga yang dipergunakan dalam analisis ini adalah harga berlaku ditingkat nelayan. Pendapatan usaha penangkapan merupakan selisih antara nilai produksi dengan biaya usaha yang dikeluarkan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I = R - TC$$

Dimana :

I = *income* (pendapatan)

R = *revenue* (penerimaan)

TC = *total cost* (total biaya)

dengan,

$$R = P \times Q$$

Dimana :

P = *price* (harga)

Q = jumlah produksi
dan,

$$TC = TFC + TVC$$

Dimana:

TFC = *total fixed cost* (total biaya tetap)

TVC = *total variabel cost* (total biaya variabel)

(2) Biaya transaksi

Menurut Anwar (1995), suatu aktivitas ekonomi secara teknis efisien, apabila sejumlah input tertentu menghasilkan maksimum output. Sedangkan dalam suatu proses produksi dikatakan efisien apabila dengan biaya tertentu dicapai keuntungan yang maksimal. Sumber inefisiensi disebabkan karena adanya biaya produksi dan biaya transaksi yang tinggi, yang menyebabkan biaya untuk mencapai keuntungan tertentu menjadi tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu (1) biaya informasi (*informasi cost*), (2) biaya pengawasan (*policy cost*), dan (3) biaya pengambilan keputusan (*decision making cost*).

Biaya transaksi dari suatu pertukaran merupakan karakteristik yang melekat pada suatu kelembagaan. Nelayan sebagai suatu komponen dalam kelembagaan tidak memiliki akses dan kontrol secara penuh terhadap penentuan nilai dari biaya transaksi. Analisis biaya transaksi menekankan juga pada pentingnya proses kegiatan terutama dalam lamanya waktu yang diperlukan maupun biaya uang dan tenaga kerja yang dicurahkan. Pertimbangan tersebut diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam perusahaan agribisnis atau bisnis lainnya maupun organisasi bentuk

lainnya dan bahkan berlaku untuk organisasi yang non profit. Dalam biaya transaksi ini diperhitungkan biaya seperti biaya pasar (biaya negosiasi dan kontrak) dengan pihak lain dan biaya transaksi internal yang terjadi dalam unit organisasi atau perusahaan itu sendiri (Anwar, 1997).

Konsep biaya transaksi yang dikembangkan oleh Williamson (1985) didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu pada dasarnya bersifat rasional, tetapi dalam melakukan pilihan dia menghadapi keterbatasan (*bounded rationality*). Oleh karena keterbatasan inilah maka orang yang bersangkutan kadang-kadang akan menunjukkan perilaku yang opportunistik (*opportunistic behaviour*). Sikap opportunistik dari individu sebagai refleksi dari rasionalitas yang terbatas akan muncul sebagai suatu fenomena masalah dalam negosiasi dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.

Analisis ini ditujukan untuk melihat efisiensi kelembagaan kerjasama, variabel yang ditelaah adalah nilai dari biaya informasi (*information cost*), biaya kontrak (*contractual cost*), serta biaya pengawasan dan pelaksanaan hukum (*policing cost*). Perincian mengenai variabel yang akan ditelaah dalam biaya transaksi, akan ditentukan dari hasil analisis mengenai proses pelaksanaan kerjasama.

(3) Indikator Keberhasilan

Analisis yang digunakan pada tahapan ini adalah analisis secara kualitatif dan ditujukan untuk mengkaji kriteria keberhasilan kerjasama program PUMP-PB dan realisasinya berdasarkan harapan-harapan partisipan. Untuk itu proses analisis menggunakan metode skoring dengan kategori sebagai berikut: 5 = sangat baik, 4 =

baik, 3 = kurang baik, 2 = buruk, dan 1 = sangat buruk. Dari hasil skoring tersebut selanjutnya dilakukan analisis secara diskriptif.

(4) Partisipasi dan Presepsi Peserta Program PUMP-PB

Proses analisis ditujukan untuk mengkaji respon peserta serta pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama program PUMP-PB terhadap kinerja kerjasama tersebut. Partisipasi peserta dianalisis dengan menggunakan kategori rendah, sedang dan tinggi. sedangkan presepsi dari partisipan diklasifikasi berdasarkan kategori baik, kurang baik dan buruk.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya

Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) di Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil Tahun 2011 meliputi empat desa yakni Desa Sathean, Letman, Letvuan dan Ohiobadar. Pemilihan keempat desa ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pembudidaya masih mempergunakan sarana prasarana budidaya yang terbatas dan tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi rumput laut yang dihasilkan sangat rendah, disamping itu pembudidaya pada lokasi ini mempunyai akses ke pasar dan memiliki *bergaining position* yang lemah. Selain itu pula pemilihan keempat desa ini didasarkan atas penilaian proposal oleh Tim teknis yang dibentuk oleh dinas untuk mengevaluasi kelayakan usaha yang diusulkan oleh kelompok budidaya rumput laut.

Kerjasama pada kecamatan ini berlangsung sejak Tahun 2011, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Konsep kerjasama yang diterapkan oleh dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara yakni melalui tenaga pendamping yang ditunjuk langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan terbentuklah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdiri atas 4 kelompok yang memperoleh. Untuk lebih jelasnya KUB budidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil di sajikan pada Tabel 4.1.

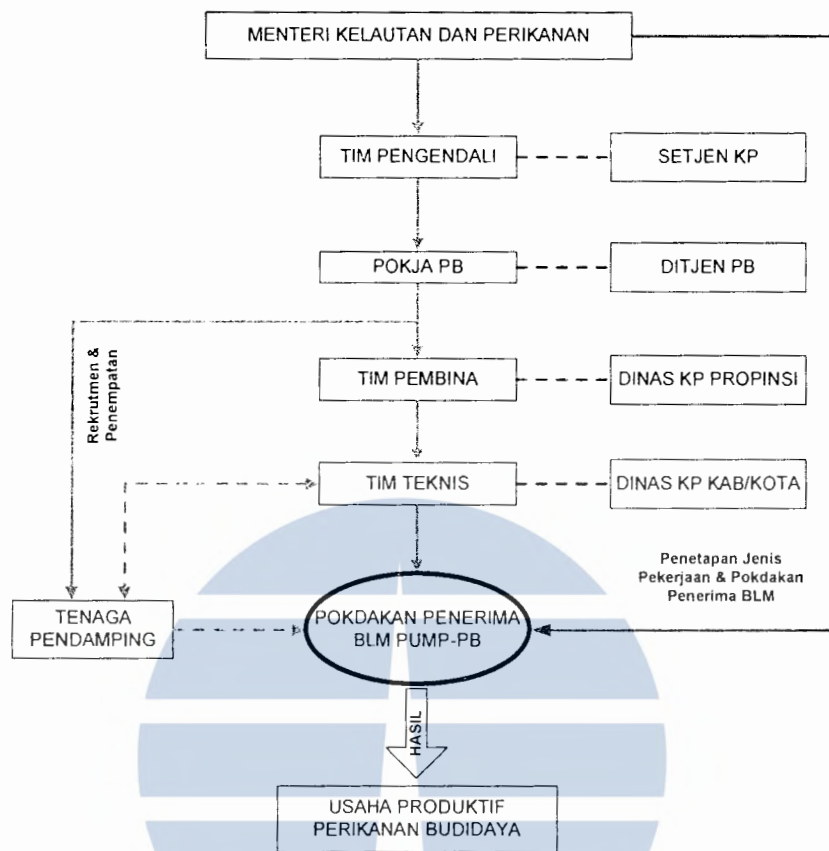
Tabel 4.1. Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Penerima BLM PUMP-PB di Kecamatan Kei Kecil 2011

No.	Nama Kelompok	Desa Asal	Jumlah anggota
1	Maren	Letvuan	10 orang
2	Helat Masa Jau	Sathean	10 orang
3	Gracilaria	Letman	10 orang
4	Ubun Vuan	Ohoibadar	10 orang

Sumber: DKP Kab.Malra (2012)

Pola dasar pelaksanaan PUMP-PB adalah menggunakan cara swakelola kepada kelompok masyarakat (berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010) yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan Pokdakan dalam mengembangkan usaha prospektif guna mendukung peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan serta penyerapan tenaga kerja di bidang perikanan budidaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, komponen utama dari pola pelaksanaan PUMP-PB : 1) Keberadaan lahan/perairan potensial untuk pengembangan usaha perikanan budidaya; 2) Keberadaan Pokdakan adalah di wilayah perdesaan; 3) Keberadaan tenaga pendamping di lokasi binaannya; 4) Sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pembinaan dan pertemuan; 5) Penyaluran dana BLM kepada kelompok pembudidaya ikan untuk pengembangan usaha budidaya ikan dengan cara swakelola kepada kelompok masyarakat (Pokdakan) sesuai dengan ketentuan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010; 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk lebih jelasnya pola dasar Pelaksanaan PUMP-PB di sajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Pola Dasar Pelaksanaan PUMP-PB

B. Karakteristik Rumah tangga Kelompok Pembudidaya

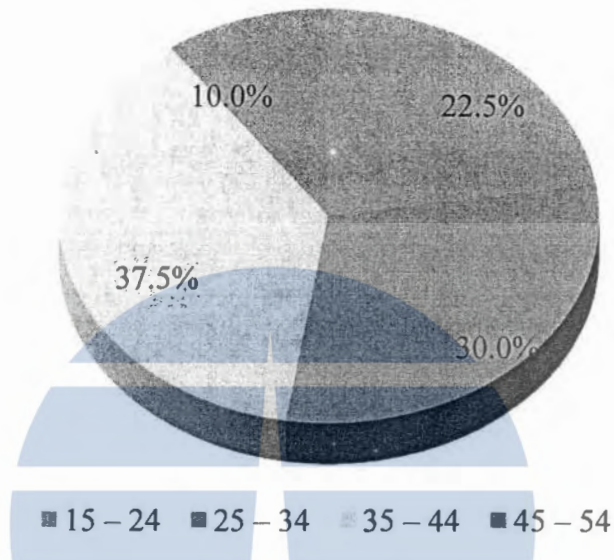
Karakteristik peserta yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah umur, tingkat pendidikan, tanggungan keluarga, dan pengalaman usaha.

Karakteristik tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Umur

Umur berkaitan dengan pengalaman belajar, kemampuan dan kematangan. Kematangan seseorang baik secara fisik maupun biologis dan mental dapat dilihat dari berbagai indikator. Umur merupakan salah satu faktor sosial yang berpengaruh terhadap aktifitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan tabulasi hasil kuisisioner, prosentase tingkatan umur kelompok pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Kisaran Umur Kelompok Pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil program PUMP-PB

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa prosentase pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil dengan kisaran umur 35 – 44 tahun merupakan prosentase terbesar yakni 37,5 %, menyusul kisaran umur 25 – 34 tahun sebesar 30 % dan yang terkecil kisaran umur 15 – 24 tahun. Bila dikaitkan dengan defenisi BPS berdasarkan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah) maka semua kisaran umur yang ada merujuk kepada usia kerja, dan angkatan kerja karena berumur lebih dari 15 tahun (BPS, 2010).

Hasil tabulasi data responden pembudidaya menunjukkan bahwa umur termuda dan tertua responden pembudidaya ditemukan di Desa Letvuan yakni masing-masing 16 Tahun dan 54 tahun. Rata-rata umur pembudidaya (Lampiran 3)

terendah di desa Ohoibadar yakni 40,3 tahun dan yang tertinggi di Desa Letman yakni 40,6 tahun dengan total rata-rata untuk semua lokasi sebesar 43,9 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum umur pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berada pada usia produktif menurut Socharjo dan Patong (1984) yakni berada diantara 15 – 54 tahun.

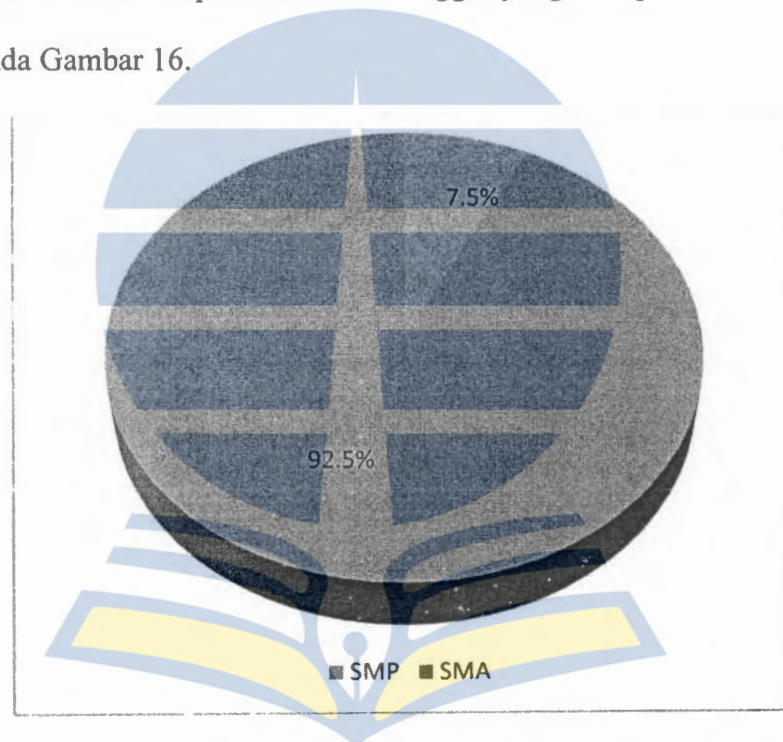
2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sebagai salah satu karakteristik individu yang cukup terkait dengan pengetahuan, ketrampilan dan produktivitas. Tingkat pendidikan mempengaruhi kerasionalan seseorang dalam mengambil keputusan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin rasional seseorang dalam mengambil keputusan dan akan semakin mudah untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan produktivitas usahanya.

Pendidikan yang dialami seseorang menyebabkan individu banyak mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap mental yang kuat. Pengetahuan, pengalaman, dan sikap mental yang diperoleh akan berpengaruh terhadap pola tingkah laku dan sikapnya. Diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat sesuai dengan teori *Human Capital* yang menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Ace dan Tilaar, 1993).

Pendidikan formal merupakan suatu ukuran kemampuan seseorang dalam melaksanakan aktifitas, sekalipun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan tingkat pendidikan tinggi diharapkan petani/pembudidaya dapat berfikir secara rasional untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, prosentase tingkat pendidikan pembudidaya Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang memperoleh dana PUMP-PB disajikan pada Gambar 16.



Gambar 4.3. Tingkat Pendidikan Kelompok Pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil program PUMP-PB

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa persentase terbesar pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Atas)/Sederajat yakni sebesar 92,5% menyusul SMA (Sekolah Menengah Atas)/Sederajat sebesar 7,5%.

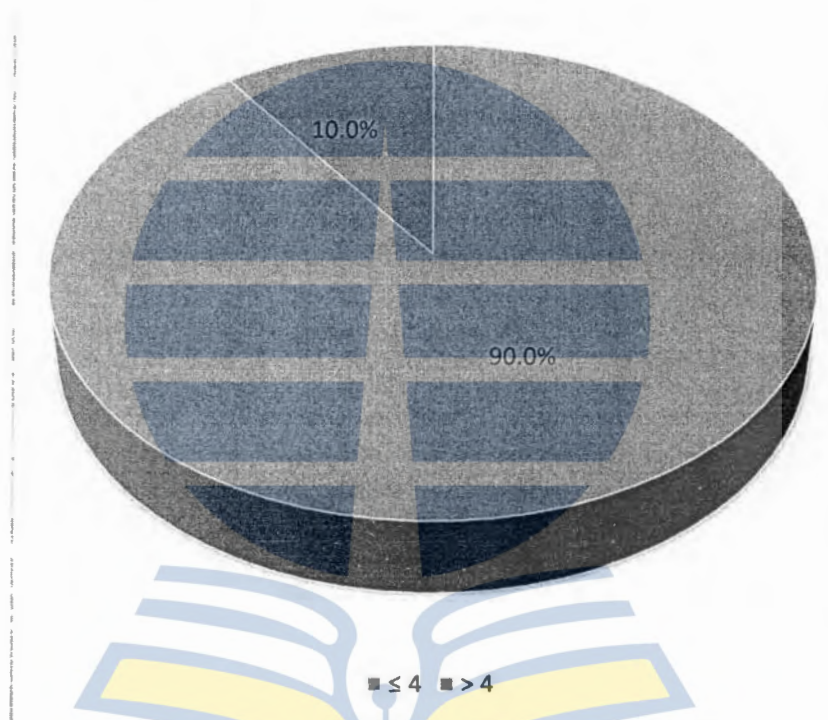
Hai ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan formal mayoritas pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil kualitas pendidikannya sedang. Menurut Mukson *dkk.*, (2005) bahwa tingkat pendidikan yang dianggap tinggi untuk produsen adalah adalah tamat SLTP dan SLTA. Pada tingkat pendidikan tersebut pembudidaya rumput laut diharapkan mampu menyerap berbagai informasi tentang kegiatan yang terkait dengan bidang usaha yang dikelola.

3. Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang tinggal dalam satu rumah yang secara langsung menjadi beban atau tanggungan kepala keluarga ataupun yang tidak serumah namun masih menjadi tanggungan kepala keluarga. Menurut Hernanto (1993), jumlah tanggungan keluarga yang semakin besar menyebabkan seseorang memerlukan tambahan pengeluaran, atau penghasilan yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupan. Besarnya jumlah anggota keluarga yang menggunakan jumlah pendapatan yang sedikit akan berakibat pada rendahnya tingkat konsumsi. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja, kecerdasan dan menurunnya kemampuan berinvestasi. Namun bila dicermati lebih jauh maka tanggungan keluarga merupakan salah satu sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan untuk membantu usaha keluarga. Jumlah tanggungan keluarga yang besar sebenarnya merupakan suatu aset penting dan sekaligus merupakan potensi yang penting sebagai sumber tenaga kerja dalam pengembangan usaha.

Pengelompokan jumlah tanggungan keluarga dilakukan berdasarkan klasifikasi dari BPS yakni tanggungan keluarga kecil 1 – 3 orang, tanggungan keluarga sedang 4 - 6 orang dan tanggungan keluarga besar lebih dari 6 orang.

Berdasarkan hasil penelitian, persentasi jumlah tanggungan keluarga responden kelompok pembudidaya di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil disajikan pada Gambar 4.4.

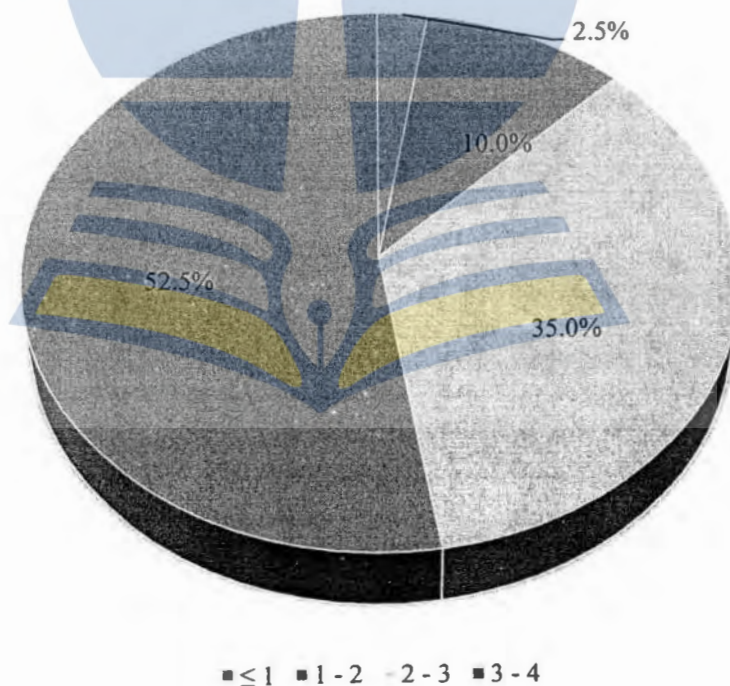


Gambar 4.4. Tanggungan Keluarga Kelompok Pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil program PUMP-PB

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa prosentase terbesar sebanyak 90% responden pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil memiliki tanggungan keluarga sebanyak lebih besar dari 4 orang yang oleh BPS dikategorikan sebagai jumlah tanggungan sedang. Kemudian menyusul tanggungan lebih kecil dari 4 orang sebesar 10% yang dikategorikan jumlah tanggungan kecil.

4. Pengalaman Usaha

Selain faktor pendidikan pembudidaya, pengalaman sebagai pembudidaya juga mempunyai peranan yang cukup penting di dalam menunjang keberhasilan pembudidaya dalam mengembangkan usaha budidayanya. Pembudidaya yang sejak turun temurun berprofesi sebagai pembudidaya, diyakini lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan usaha budidaya serta memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan yang sama sekali belum mempunyai pengalaman khususnya dalam usaha budidaya rumput laut. Berdasarkan hasil penelitian, persentasi pengalaman usaha responden kelompok pembudidaya program PUMP-PB di kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5. Pengalaman Usaha Kelompok Pembudidaya Rumput Laut di Kecamatan Kei Kecil program PUMP-PB

Pengalaman dalam berusaha merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan budidaya rumput laut. Semakin lama pembudidaya menggeluti kegiatan budidaya rumput laut, maka semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga mampu mengelola usahanya secara efisien untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Menurut Hernanto (1993) bahwa dengan pengalaman yang cukup dalam suatu kegiatan usahatani, maka petani (pembudidaya) yang bersangkutan sudah mengetahui masalah dan kendala yang terjadi dalam usaha budidayanya. Hal ini memungkinkan pembudidaya mampu mengorganisir usahanya sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa persentasi terbesar periode pengalaman usaha responden pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara adalah berada pada kisaran 3 – 4 tahun sebesar 52,5 %. Selanjutnya berturut-turut kisaran 2 – 3 tahun dan 1 - 2 tahun dan lebih kecil dari 1 tahun masing-masing sebesar 35 % dan 10 % dan 2,5 %. Menurut Soeharjo dan Patong (1984), kategori kurang berpengalaman apabila pembudidaya menggeluti pekerjaannya kurang dari 5 tahun, cukup berpengalaman 5 – 10 tahun, dan berpengalaman di atas 10 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka prosentase kisaran pengalaman usaha pembudidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Khususnya dapat dikatakan mayoritas pembudidaya dikategorikan kurang berpengalaman.

C. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (UU RI No. 13 tahun 2003). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan sepanjang tahun berbeda tergantung musim. Pada musim Barat dimana produksi cenderung menurun pembudidaya memakai tenaga kerja dalam keluarga sendiri yakni istri dan anak-anak.

Pada musim Timur dimana aktifitas dan produksi cenderung meningkat pembudidaya biasanya menambah tenaga kerja dari luar terutama untuk pengikatan tali bibit yang tenaga kerja yang juga berasal dari keluarga, tetap ada budaya setempat yang masih dianut yakni “maren”, dimana untuk kegiatan pengikatan bibit digunakan tenaga yang adalah masyarakat yang ada di desa mereka, Maren yang dilakukan adalah merupakan bentuk kerjasama yang telah diwariskan oleh para leluhur.

D. Sumber Pendapatan Dan Jenis Pekerjaan Sampingan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Program PUMP-PB

Sebagian besar pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil mempunyai mata pencaharian lain selain usaha budidaya rumput laut. Pembudidaya rumput laut juga memiliki alternatif pekerjaan lain seperti: berkebun, tapi masih bersifat subsiten artinya hanya untuk kebutuhan keluarga dan belum berorientasi pasar, sementara pekerjaan lain yang ditekuni adalah sebagai nelayan. Hal ini berimplikasi pada naik

turunnya jumlah pembudidaya dan besar kecilnya luas lahan yang dikelola oleh pembudidaya

Secara umum pekerjaan kelompok pembudidaya rumput laut di kecamatan Kei kecil sebelumnya adalah sebagai nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan adalah merupakan pekerjaan yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan sebagai nelayan bukan merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi keluarga, karena ada pekerjaan sampingan lainnya yang diupayakan bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Telah dijelaskan bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor musim, sehingga ketika terjadi musim Timur, ditemukan umumnya nelayan di lokasi penelitian melakukan pekerjaan berupa bercocok tanam, dengan jenis tanaman umbi-umbian. Dari hasil penelitian pula ditemukan bahwa pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh kelompok nelayan pembudidaya rumput laut adalah bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendapatan rumahtangga. Pendapatan ini selanjutnya akan mempengaruhi pola hidup masing-masing keluarga dan cara pengaturan keuangan dalam keluarga yang pada akhirnya akan mempengaruhi nelayan tersebut di dalam merencanakan pengembangan usaha budidayanya.

E. Diskripsi Teknis Budidaya Rumput Laut

Ditinjau dari aspek teknik produksi, beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menjamin keberhasilan usaha budidaya rumput laut adalah: lokasi, bibit, teknik atau metode budidaya, pemeliharaan, teknik panen, dan pembinaan/pendampingan (Anggadiredja *dkk.*,2008).

Metode budidaya yang digunakan pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara adalah metode rawai atau yang biasa dikenal dengan metode *long line* sebagaimana yang dimaksud oleh Sujatmiko dan Angkasa (2008). Beberapa metode pernah diujicoba di Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka memaksimalkan produksi seperti: metode rakitapung yakni metode *long line* yang dimodifikasi, yang diuji coba oleh BBL (Balai Budidaya Laut) Ambon. Metode tersebut oleh pembudidaya dinilai kurang efektif karena kesulitan dalam membersihkan rumput laut serta besarnya resiko rusakan unit budidaya akibat hempasan ombak atau gelombang. Selain itu juga metode *floaton* yang konstruksinya diprakarsai atas kerjasama Bappeda Provinsi Maluku dan ITS (Institut Teknologi Surabaya) Surabaya. Kedua metode ini menurut pandangan penulis tidak adaptif dan aplikatif terutama karena material yang digunakan cukup mahal sehingga tidak ekonomis bagi pembudidaya yang memiliki modal terbatas.

Tahapan-tahapan budidaya rumput laut di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara adalah:

1) Persiapan lahan dan sarana budidaya

Persiapan lahan dilakukan untuk mengetahui lokasi yang dianggap ideal oleh pembudidaya sebagai lokasi budidaya rumput laut. Pembudidaya umumnya mempertimbangkan jarak dari pantai sebagai pertimbangan utama disamping kedalaman. Kedua hal tersebut terkait dengan pertimbangan ekonomis yakni semakin dekat jarak dari pantai maka semakin mudah dan semakin murah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan atau pengontrolan unit budidaya. Demikian pula halnya dengan kedalaman, lokasi yang dianggap terlalu dalam akan membutuhkan

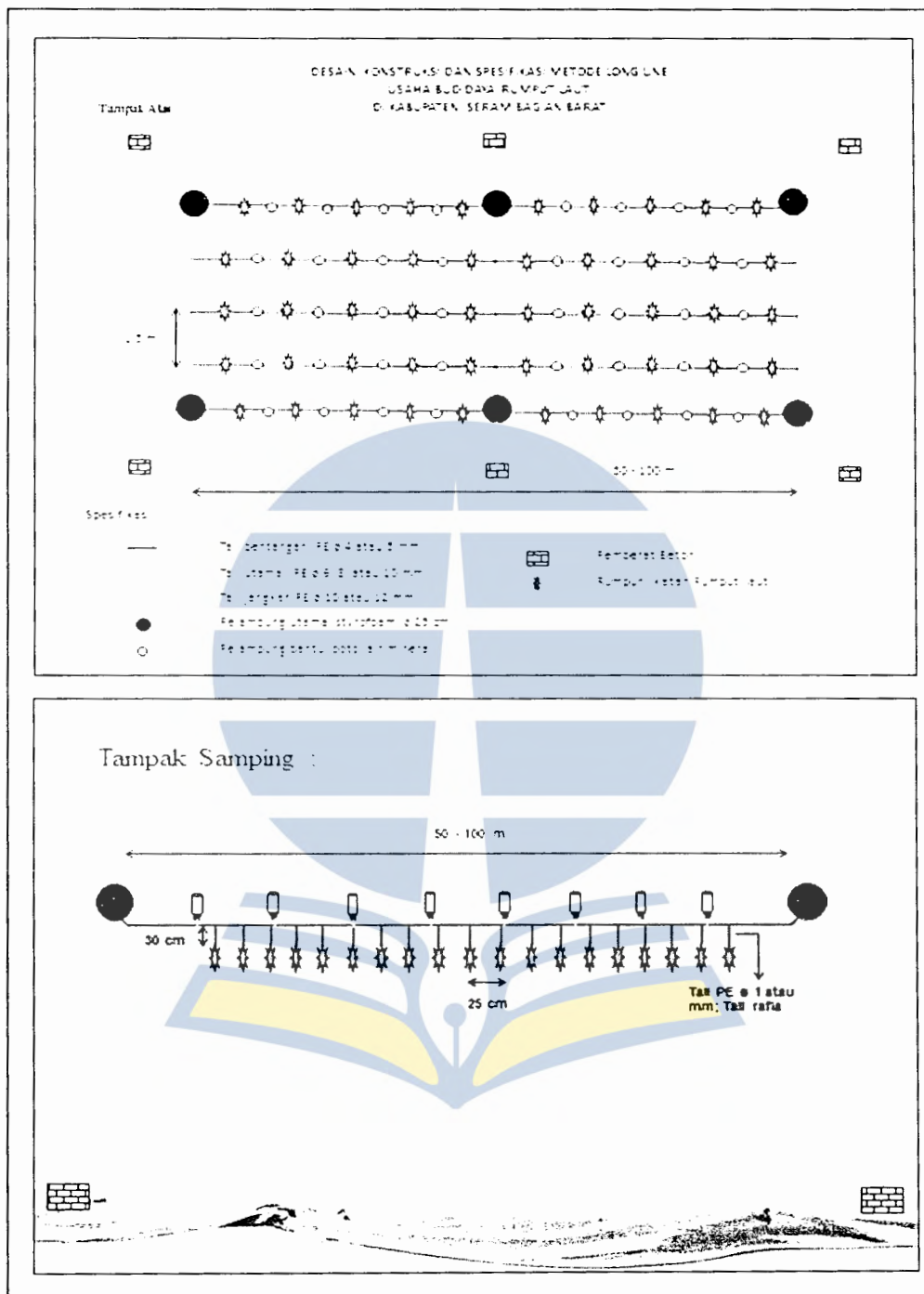
biaya operasional yang cukup besar baik dari segi penyediaan sarana tali dan jangkar maupun setting konstruksi unit budidaya.

Adanya aturan tidak tertulis berupa ‘sistem kavling’ memungkinkan pembudidaya yang telah memasang unit usaha pada satu lokasi maka dianggap dianggap lokasi tersebut menjadi milik pembudidaya bersangkutan sehingga pembudidaya baru harus mencari lokasi lainnya yang dianggap menguntungkan. Setelah pembudidaya menemukan lokasi yang dianggap tepat selanjutnya pada saat kegiatan dimulai material-material yang telah disiapkan menjadi unit *long line* yang akan dipergunakan dalam pembibitan dan pemeliharaan rumput laut.

Pada saat satu periode musim tanam selesai konstruksi tersebut tetap dipertahankan kecuali tali bentangan beserta pelampung botol air mineral yang diangkat pada saat panen. Hal ini dimaksudkan untuk mengefisienkan tenaga, waktu dan biaya.

Konstruksi *long line* yang dibuat pembudidaya diilustrasikan seperti pada Gambar 4.6.





Sumber: Maryanus (2012)

Gambar 4.6. Ilustrasi Konstruksi Long Line (Tampak Atas dan Samping)

2) Pembibitan

Bibit yang akan digunakan dalam budidaya rumput laut harus berkualitas baik agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan diketahui bahwa sebagian besar pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil menyiapkan sendiri bibitnya. Menurut pendapat Aslan (1998), sumber bibit sedapat mungkin dekat dengan lokasi budidaya. Pembudidaya membibitkan sendiri rumput laut yang akan digunakan untuk usaha budidaya, setelah mencapai umur 20 sampai 25 hari selanjutnya bagian thallusnya dipetik untuk selanjutnya dipasang pada tali bentangan yang sudah disiapkan. Sebagian pembudidaya lainnya memperoleh bibit dari hasil panen rumput laut yang rata-rata dipanen pada umur 40 – 45 hari. Setelah rumput laut dipanen langsung dipisahkan bagian thallus muda untuk selanjutnya kembali ditanam.

Berdasarkan hasil wawancara, bibit yang ditanam pembudidaya umumnya berumur 20 sampai 25 hari. Bibit dipilih pada ujung tanaman, karena bagian ini terdiri dari sel dan jaringan muda sehingga akan memberikan pertumbuhan yang optimal. Sebelum adanya penyuluhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Kei Kecil sebagian besar pembudidaya dalam penyediaan bibitnya menggunakan metode panen sebagian (cara parsial) yakni pada saat panen, tali bentangan tidak dilepas sedangkan rumpun hanya dipotong dengan pisau dan disisakan sebagian untuk selanjutnya ditunggu sekitar 40 – 45 hari untuk dipanen lagi, hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan yang tidak optimal karena bagian yang disisakan adalah bagian pangkal yang berumur tua dan relatif lambat membuat percabangan baru.

Untuk 1 tali bentangan berukuran 50 meter biasanya dibutuhkan bibit berkisar antara 8 - 9 kilogram atau disesuaikan dengan ketersediaan bibit. Banyaknya bibit yang diikatkan pada tali bentangan disesuaikan dengan ketersediaan bibit dan pengalaman pembudidaya. Berdasarkan hasil observasi berat bibit rata-rata yang digunakan pembudidaya berkisar antara 54,7 – 78,3 gram.

3) Penanaman

Penanaman dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 06.00 atau sore hari sekitar pukul 16.00. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah peningkatan suhu baik pada saat pengangkutan bibit yang telah diikat pada tali bentangan ke lokasi budidaya disamping mencegah kemungkinan stress bibit pada saat pemasangan tali bentangan. Bibit yang telah dipasang pada tali bentangan dengan jarak 25 cm. Jarak antara bibit ini sesuai yang disarankan oleh Kolang *dkk.*, (1996) *diacu dalam* Kadari (2004), namun hasil penelitian Kadari (2004) di Pulau Menjangan Besar menemukan bahwa jarak tanam bibit yang terbaik adalah 15 cm. Bibit diangkat dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan gerobak sampai di pinggir pantai. Selanjutnya bibit dibawa menuju lokasi dengan menggunakan perahu. Setelah tali bentangan yang sudah dipasang bibit selesai diikatkan pada tali utama, terakhir adalah pemasangan pelampung botol air mineral dengan jarak 3 - 5 meter untuk mempertahankan agar bibit yang mengapung tetap berada dibawah permukaan air antara 10 sampai 15 cm. Salah satu penyebab kegagalan panen adalah masih kurangnya perhatian pembudidaya terhadap upaya untuk mempertahankan bibit/rumpun tetap berada dibawah permukaan air. Selanjutnya bahwa dalam banyak kasus apabila bibit tepat

berada pada permukaan air, bibit akan terpapar langsung oleh cahaya matahari yang berakibat kematian bibit.

4) Pemeliharaan

Pengontrolan terhadap rumput laut yang dibudidayakan dilakukan setiap dua hari bahkan pada saat menjelang panen dilakukan setiap hari. Sarana yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan rumput laut adalah sampan tanpa mesin atau istilah setempat panggayo atau dengan menggunakan ketinting. Pemeliharaan rumput laut meliputi:

- Pemeriksaan tanaman dan menguatkan ikatan tali tanam yang kendor akibat terkena ombak, mengganti tanaman pada ikatan yang hilang akibat hempasan gelombang,
- Pembersihan organisme penempel (*biofouling*) kerang-kerangan (tiram) dan alga filamen yang oleh penduduk lokal disebut '*conse-conse*' yang menempel pada tanaman atau tali. Alga filamen biasanya ditemukan pada saat transisi Musim Barat ke Musim Timur sekitar bulan April, dan umumnya muncul setelah periode infeksi *ice-ice* (Yulianto, 2003). Hama lainnya yang banyak dijumpai adalah ikan beronang (*Siganus spp*), bulu babi (*Diadema sp*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*).
- Pembersihan terhadap kotoran berupa pasir, lumpur dan hama yang menempel pada rumput laut dilakukan untuk menghindari kerontokan dan menjaga pertumbuhan tetap normal. Hal ini dilakukan dengan cara menggoyang-

goyangkan tanaman agar kotoran dapat terlepas seperti yang dianjurkan Anggadiredja *dkk.*, (2006), dan

- Memasang dan mengganti pelampung yang terlepas akibat hempasan ombak. Pada minggu ketiga masa pemeliharaan biasanya pembudidaya memberikan beban pada tali bentangan dengan jalan mengisi air pada botol pelampung dengan maksud menjaga tanaman berada pada kedalaman 30 – 40 cm dari permukaan air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembudidaya kelompok program PUMP-PB yang paling dikeluhkan pada masa pemeliharaan adalah penyakit *ice-ice* yang berdampak terhadap kematian rumput laut. Menurut Direktorat Kesling DKP (2005) *ice-ice* merupakan penyakit yang banyak menyerang rumput laut. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik/bercak-bercak merah pada sebagian yang lama kelamaan menjadi kuning pucat dan akhirnya berangsur-angsur menjadi putih, *thallus* menjadi rapuh dan mudah putus. Gejala yang diperlihatkan adalah pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat dan pada beberapa cabang menjadi putih, *thallus* menjadi putih dan membusuk. Penyakit ini timbul sebagai akibat infeksi sekunder oleh beberapa jenis bakteri seperti: *Vibrio* sp, *Aeromonas* sp, *Pseudomonas* sp (Yulianto, 2003) dan *Pseudoalteromonas gracilis* (Direktorat Kesling DKP, 2005) setelah sebelumnya bibit mengalami stress dan terjadi infeksi primer oleh hama seperti ikan beronang dan penyu.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui penyakit *ice-ice* biasanya menyerang pada Musim Barat dan mencapai puncaknya pada saat transisi dari Musim Barat ke Musim Timur sekitar Bulan April. Langkah yang ditempuh oleh pembudidaya untuk

mencegah meluasnya serangan penyakit *ice-ice* adalah dengan memotong bagian thallus yang terinfeksi dan melakukan pembersihan secara rutin.

Permasalahan lainnya yang ditemui oleh pembudidaya selama masa pemeliharaan adalah dampak negatif dari nelayan yang melakukan penangkapan secara *poisoning* dan *destructive fishing* yaitu penggunaan potas (*potassium cyanide*) dan bom oleh nelayan. Dampak langsung terhadap usaha budidaya rumput laut adalah adanya kematian massal rumput laut akibat rumput laut setelah terpapar arus yang membawa sisa-sisa potas. Menurut beberapa pembudidaya kematian rumput laut secara massal biasanya hanya terjadi dalam waktu semalam setelah terpapar potas.

5) Panen dan pascapanen

Panen rumput laut yang dilakukan oleh pembudidaya di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara saat ini bisa dikatakan semuanya memakai cara panen total (*full harvest*). Untuk mendapatkan hasil yang baik rumput laut dipanen setelah mencapai umur 40 – 45 hari. Panen dilakukan dengan cara melepas tali bentangan, sebelum diangkat ke darat dilakukan pencucian dengan air laut untuk membuang kotoran atau tanaman lain yang tercampur dengan rumput laut. Setelah sampai di darat rumput laut dirontokkan diatas para-para penjemuran yang sudah dialas dengan waring. Kegiatan panen dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit dengan tujuan setelah selesai panen rumput laut dapat langsung dijemur dibawah terik matahari. Panen biasanya dilakukan langsung oleh kepala keluarga dibantu oleh anggota keluarga lainnya, pada Musim Timur dimana produksi meningkat biasanya

pemilik usaha meminta tambahan tenaga dari tetangga yang kebetulan tidak memiliki aktifitas.

Tahapan selanjutnya adalah kegiatan penjemuran. Penjemuran dilakukan diatas para-para untuk menghindari tercampurnya rumput laut dengan kotoran dan mempercepat penetasan air dari rumput laut. Lamanya penjemuran tergantung cuaca, apabila cerah memakan waktu 2 – 3 hari dan bisa lebih apabila cuaca mendung. Pada kondisi hujan pembudidaya biasanya menutup rumput laut dengan terpal atau plastik. Setelah kering rumput laut diayak atau dibolak-balik untuk membuang sisa-sisa garam yang menempel. Pengepakan merupakan kegiatan akhir dari tahapan pasca panen rumput laut. Rumput laut yang telah kering dimasukkan kedalam karung sampai padat dan disimpan dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Untuk menghindari kerusakan fisik, rumput laut diletakkan bersusun diatas lantai yang sudah dialas papan.

F. Konsep Kerjasama Kelembagaan PUMP-PB

Secara umum konsep kerjasama antara masyarakat pembudidaya dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya yakni dinas kelautan dan perikanan, dan tenaga pendamping didasarkan pada konsep tertulis. Dalam implementasinya, konsep kerjasama yang mendasarinya dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu aturan main dan organisasi pelaksana. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kedua aspek tersebut, maka penjelasannya dirinci sebagai berikut:

1. Aturan Main

Kelembagaan kelompok pembudidaya rumput laut (KUB) dalam bahasan ini didekati dengan analisis deskriptif yang menitikberatkan pada aspek batas yuridiksi, hak kepemilikan dan aturan representatif.

- ◆ Batas yuridiksi. Banyak permasalahan dan isu dalam ekonomi berkaitan dengan struktur dari batas yuridiksi. Konsep batas yuridiksi dapat memberi arti batas kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mengatur sumberdaya. Dalam kasus pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di laut, batas yuridiksi memegang peranan penting dalam menentukan penanggung dan keluaran.
- ◆ Hak Kepemilikan. Konsep hak kepemilikan selalu mengandung makna sosial, yang mencakup hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) yang diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau konsensus antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Implikasinya adalah 1) hak individu adalah merupakan tanggungjawab bagi orang lain, dan 2) kepemilikan adalah sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya perikanan.
- ◆ Aturan representatif. Aturan representatif (*rule of representation*) mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap kinerja (*performance*) akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, aturan representatif menentukan alokasi dari distribusi sumberdaya yang langka, sehingga analisis

kelembagaan mengenai alternatif aturan representatif akan berguna untuk memecahkan masalah efisiensi dalam pengambilan keputusan.

Kerjasama yang terbangun melalui program PUMP-PB di Kecamatan Kei Kabupaten Maluku Tenggara memiliki aturan main didasarkan pada pedoman Teknis PUMP-PB. Secara lebih rinci aturan main pelaksanaan kerjasama disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Aturan Main Dalam Kelembagaan Program PUMP-PB

Dimensi Kelembagaan	Kelompok Pembudidaya
Aspek yuridiksi :	
1. Dinas kelautan dan perikanan Kab/Kota	- Melakukan perencanaan alokasi Anggaran PUMP untuk masing-masing lokasi, jenis dan jadwal kegiatan budidaya, jumlah pokdakan, alokasi biaya perkelompok sesuai harga perkiraan sendiri
2. Tenaga Pendamping	- Identifikasi calon lokasi dan kelompok sasaran - Seleksi calon peserta PUMP-PB - Sosialisasi Kegiatan PUMP-PB - Penumbuhan Kelompok - Bimbingan Teknis Budidaya - Pembinaan Manajemen Usaha - Penumpukan Modal Usaha
Property right :	
1. Daerah budidaya 2. Pemasaran 3. Bantuan 4. Resiko usaha	- Perairan sekitar Maluku Tenggara - Pedagang pengumpul yang ada di desa maupun ke Tual dan Langgur - Memanfaatkan bantuan dengan baik - Terjadi persaingan dengan pembudidaya lain
Aturan Representasi:	
1. Forum komunikasi 2. Pengambilan keputusan 3. Penanganan konflik	- Di tingkat pengurus Pokdakan - Ditentukan oleh ketua kelompok - Pokdakan meminta dinas kelautan dan perikanan memfasilitasi

Sumber: Data sekunder diolah, (2012)

Mengenai aspek batas yuridiksi, komponen dalam program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP-PB) terkait dalam kerangka saling membutuhkan dan saling menunjang guna mendapatkan keuntungan. Pihak lain yang ikut terlibat pada prinsipnya untuk membina guna memperkuat peran dan posisi masing-masing. Kalaupun ada pihak tertentu yang turut memperoleh manfaat berkat keterlibatannya tersebut, tidak boleh berada di luar konsep pembinaan. Meskipun demikian, dalam aspek yuridiksi ini tidak nampak spesifikasi bantuan atau pembinaan dari setiap unsur terkait. Keterlibatan sebagai pembina lebih bersifat normatif karena adanya kewajiban yang melekat pada instansi tersebut, tanpa disertai dengan perencanaan dan aktivitas yang sistematis dan terpadu. Kondisi ini menimbulkan sikap saling mengharap dan terjadinya tumpang tindih kegiatan pembinaan atau pemberian bantuan.

Sementara dari aspek *property right*, terkait dengan format hak dan kewajiban Kelompok pembudidaya. Dalam proses budidaya yang dilakukan oleh Kelompok pembudidaya, maka wilayah untuk dijadikan sebagai lokasi budidayatersebar tidak secara merata untuk semua pokdakan yaitu disekitar Perairan Kecamatan Kei Kecil. Kondisi budidaya dilakukan pada sore hari. Hasil budidaya berupa rumput laut yang telah dikeringkan langsung dijual ke pedagang pengumpul di desa maupun pada pedagang pengumpul di kota langgur maupun Kota Tual.

Mencermati kondisi Dinas Perikanan sebagai TIM Teknis yang tidak menyediakan pasar bagi KUB, terpaksa pembudidaya menjual hasilnya pada beberapa pedagang dengan harga yang tidak terkontrol. Jika rumput laut kering yang dipasarkan dalam bentuk yang kurang baik (bercampur dengan pasir), maka

dihargai dengan harga yang rendah oleh pedagang pengumpul. Kondisi ini menyebabkan kerugian pada KUB, hal ini disebabkan mereka tidak memiliki alternatif pasar yang lebih baik.

Mengenai pemberian bantuan berupa pembuatan wadah budidaya (longline), peralatan budidaya (tali, pelampung, mesin ketinting, body sampan, terpal, waring, pisau, sarung tangan) dan bibit melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan mekanisme swakelola yakni kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/SKPD/Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, Instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat, telah dilakukan tetapi apa yang menjadi kebutuhan nelayan dalam pengadaan bantuan belum sepenuhnya terakomodir dengan baik. Sesuatu yang dipandang baik oleh pemerintah (dinas kelautan dan perikanan) belum tentu benar-benar baik bagi Kelompok Pembudidaya. Indikasi mengenai hal ini nampak dari pengadaan bantuan yang diberikan masih kurang, sehingga pokdan harus menambah dana bagi kebutuhan usaha budidaya agar proses budidaya dapat dilakukan. Dari hasil penelitian ditemukan pula bahwa ada long line yang diberikan kepada KUB belum sesuai dengan kebutuhan KUB dalam melakukan usaha budidaya.

Menyangkut segi resiko usaha, terdapat kemungkinan KUB tidak memanfaatkan bantuan tersebut secara benar (tidak melakukan budidaya). Hal ini terbukti dari hasil penelitian, bantuan berupa sarana prasarana yang diberikan kepada kelompok pembudidaya tidak mereka gunakan. Sementara dari pihak yang dinas perikanan dan kelautan berperan dalam mengontrol aktivitas yang dijalankan

oleh pokdakan belum sepenuhnya melakukan tugas ini, sehingga persoalan yang terjadi tidak segera ditangani, bahkan ada kecenderungan dari pihak pengurus kelompok pembudidaya yang tidak serius dalam melakukan tugasnya. Dari hasil penelitian juga ditemukan pada kelompok Uvun Vuan di desa Ohoibadar ada anggota kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil khususnya dalam pembagian sarana sampan, yakni jenis dan ukuran kayu yang tidak sesuai, dan mesti mendapat klarifikasi baik dari pihak pengurus pihak pendamping maupun pihak dinas atau dalam hal ini tim teknis.

Pengkajian terhadap aturan representatif dari program PUMP-PB maka yang nampak adalah hanya terbatas pada masing-masing partisipan. Tidak ada wadah khusus yang menjadi forum komunikasi atau pengambilan keputusan secara bersama. Pada situasi seperti ini, maka pokdakan akan dirugikan, selain itu kalangan pembina tidak dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik dalam membela hak-hak kelompok masyarakat pembudidaya. Selanjutnya, kinerja kerjasama tidak dapat terevaluasi dan berkembang berdasarkan nilai-nilai kebersamaan. Situasi ini semakin memperburuk keadaan pokdakan, sebab yang terlibat dalam proses kerjasama lebih banyak diperankan oleh ketua kelompok. Padahal seyogyanya forum komunikasi akan sangat membantu dalam membicarakan secara bersama mengenai masalah-masalah yang dihadapi serta upaya penanganannya.

Upaya penanganan konflik yang terjadi, ternyata diperparah oleh kerapuhan manajemen ditingkat KUB, menjadikan pembudidaya tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasinya. Pengaduan-pengaduan yang diajukan kurang mendapat tanggapan baik dari pihak pokdan maupun dinas kelautan dan perikanan Kabupaten

Maluku Tenggara, karena mekanisme kerjanya kurang jelas, maka walupun Pokdakan ingin membantu pembudidya, namun tetap mengalami kesulitan. Sebagai contoh, pada saat kondisi perahu sampan yang tidak sesuai baik ukuran maupun jenisnya, maka mereka mengajukan permohonan untuk ada upaya pengganti, tapi kenyataannya sampai saat ini waluapun telah ada upaya untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut, oleh pihak tim teknis dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan kabupaten Maluku Tenggara, tetapi pengadaan untuk mengantikannya belum dilakukan.

Aturan main lainnya yang mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan program PUMP-PB adalah seleksi kepada pembudidaya. Adapun seleksi yang kepada Podakan di Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil dilakukan secara ketat oleh pihak Tim Teknis (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten). Persyaratan sebagai anggota Pokdakan calon penerima PUMP-PB adalah:

1. Merupakan penduduk yang tergolong tidak mampu dan belum penghasilan tetap.
2. Dewasa atau sudah menikah dan melakukan kegiatan budidaya ikan.
3. Mempunyai kegiatan usaha budidaya ikan skala mikro dan kecil, penggarap atau wirausaha pemula.
4. Berdomisili di lokasi sasaran PUMP-PB dan merupakan penduduk setempat (KTP/identitas lain).
5. Bersedia bergabung dalam kelompok minimal jumlahnya 10 orang per kelompok.

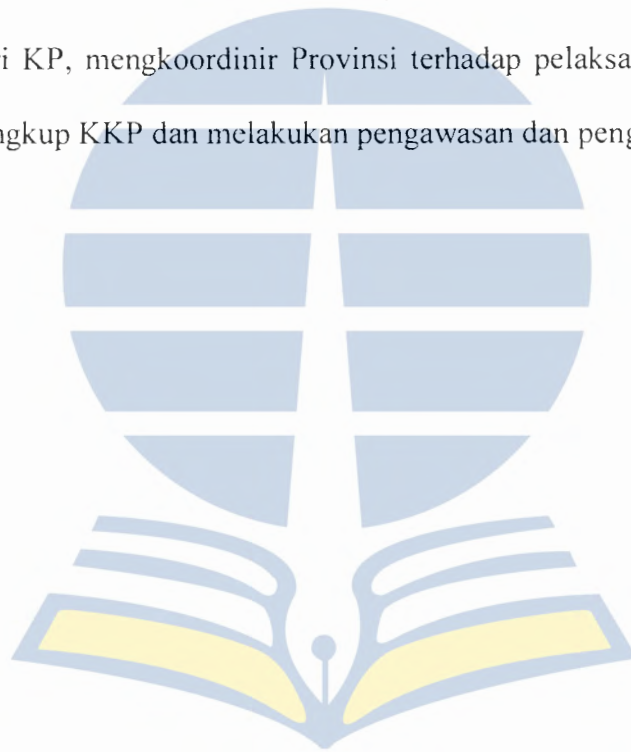
Sedangkan Kriteria Umum yang diterapkan untuk kelompok penerima PUMP-PB adalah:

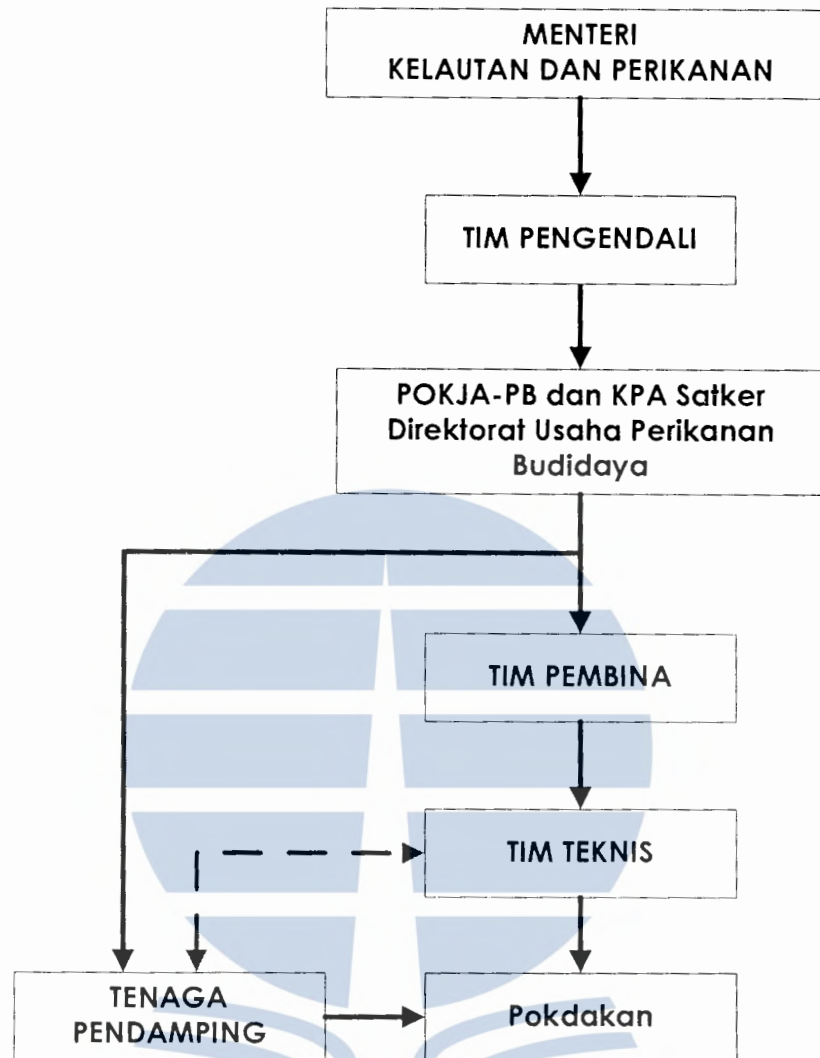
1. Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan);
2. Pengurus dan anggota bukan merupakan aparat Dinas/PNS atau unsur Aparat Desa;
3. Berdomisili di desa/kelurahan setempat;
4. Berada di dalam satu desa/kelurahan yang sama;
5. Tercatat dan di bawah binaan Dinas Kabupaten/Kota.
6. Bersedia menandatangani kontrak dengan PPK untuk pelaksanaan penggunaan dana BLM PUMP-PB guna pengadaan wadah budidaya, input produksi dan peralatan budidaya dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
7. Bersedia mengikuti ketentuan yang dikeluarkan DJPB (seperti dikerjakan secara swakelola, menyampaikan laporan kegiatan secara berkala, menerapkan CPIB/CBIB) dan teknologi anjuran.
8. Bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan teknologi budidaya ikan yang efisien dan produktif sehingga usahanya akan menguntungkan.
9. Kelompok memiliki usaha dengan komoditas budidaya budidaya yang sama

2. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana PUMP-PB terdiri dari Tim Pengendali, Pokja-PB, Tim Pembina, Tim Teknis, Tenaga Pendamping dan Pokdakan penerima dana BLM (Gambar 4.7). Dari struktur organisasi yang disajikan tersebut terlihat ada 4

komponen utama yakni pada tingkat pusat terdiri atas *pertama*: Tim Pengendali yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja lingkup KKP dan antar instansi. Tim Pengendali terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketua Tim Pengendali membentuk sekretariat dan Pokja-Pokja antara lain Pokja Perikanan Budidaya. Tugas Tim Pengendali adalah merumuskan kebijakan umum, menyusun pedoman pelaksanaan PNPM-Mandiri KP, melakukan sosialisasi pengembangan PNPM-Mandiri KP, mengkoordinir Provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri-KP lingkup KKP dan melakukan pengawasan dan pengendalian.





Gambar 4.7. Organisasi Pelaksana PUMP-PB

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan PNPM-Mandiri KP tingkat Pusat, Ketua Tim Pengendali membentuk Sekretariat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun tugas Sekretariat adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan, sosialisasi di tingkat pusat, serta koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan. *Kedua:* Dalam rangka pelaksanaan PNPM-Mandiri KP di tingkat pusat, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya membentuk Pokja. Adapun tugas Pokja-PB adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUMP-PB,

mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Dengan rincian tugas pokja adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun alokasi anggaran ke setiap kabupaten/kota yang menjadi lokasi sasaran PUMP-PB.
- b. Menyusun Pedoman Teknis pelaksanaan PUMP-PB perikanan Budidaya
- c. Melakukan sosialisasi kegiatan PUMP-PB ke daerah.
- d. Memverifikasi data Pokdakan, KAK, RUK, RUB, dan dokumen administrasi penyaluran anggaran BLM PUMP-PB.
- e. Mempersiapkan dokumen pencairan PUMP-PB dari daerah.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PUMP perikanan budidaya di daerah.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan PUMP-PB.

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat propinsi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai penanggung jawab membentuk Tim Pembina tingkat propinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas atau kasubdin/Kabid yang membidangi budidaya, dan anggota dari unsur Dinas teknis, UPT dan Bappeda serta Dinas yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.

Tugas tim pembina adalah melakukan koordinasi, rekapitulasi dan verifikasi dokumen, menyampaikan KAK, RUK, RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Pokja melalui surat Kepala Dinas Provinsi serta melakukan pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran BLM kegiatan PUMP-PB di wilayahnya. Dalam pelaksanaan PUMP-PB di Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Dinas selaku penanggung jawab membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Dinas atau kasubdin/Kabid yang membidangi budidaya anggota dari unsur Dinas teknis, UPP, Tenaga Pendamping serta Bappeda serta Dinas yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota. Tugas Tim Teknis adalah:

1. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
2. Melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota.
3. Melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi, rekapitulasi data calon kelompok penerima BLM PUMP-PB dituangkan dalam Berita Acara.
4. Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya guna pencairan BLM.
5. Menyampaikan KAK, RUK, RUB dan dokumen administrasi kepada Tim Pembina melalui surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
6. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
7. Melakukan pemantauan pemanfaatan BLM PUMP-PB oleh Pokdakan untuk usaha budidaya ikan.

Sedangkan Tenaga pendamping mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bersama Tim Teknis melakukan pemilihan Pokdakan calon penerima BLM PUMP-PB di Kabupaten/Kota.
2. Melakukan identifikasi kelayakan kegiatan usaha Pokdakan calon penerima BLM PUMP-PB.
3. Memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan budidaya.

4. Membantu dan mendampingi pokdakan dalam penyusunan KAK, RUK, RAB dan dokumen administrasi untuk pencairan BLM PUMP-PB.
5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap pengadaan sarana produksi, teknologi dan pasar.
6. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pokdakan.
7. Membantu Pokdakan membuat laporan pemanfaatan PUMP-PB
8. Membantu Pokdakan dalam membuat laporan perkembangan pemanfaatan BLM untuk usaha budidaya.
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
10. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan BLM PUMP-PB yang dilakukan oleh Pokdakan untuk kegiatan usaha budidaya ikan sesuai pedoman teknis.

Pokdakan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksana Swakelola pokdakan wajib melaksanakan dan memanfaatkan dana BLM PUMP-PB sesuai pedoman teknis.
2. Menyusun KAK, RUK, RUB, serta membuat gambar sederhana rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.
3. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, melaksanakan pemanfaatan BLM PUMP-PB serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan baik fisik maupun administrasi keuangan swakelola.
5. Mengembangkan kelangsungan budidaya secara berkelompok.

Struktur kelembagaan kelompok pembudidaya rumput laut di kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara disusun secara sederhana dan diatur sepenuhnya oleh anggota yang tergabung dalam kelompok, kemudian dibina oleh Tenaga Pendamping . Bagan struktur organisasinya seperti terdapat pada Gambar 10. Dinas Perikanan dalam hal ini TIM teknis berperan dalam menyalurkan modal untuk kelompok masyarakat pembudidaya yakni BLM dalam bentuk hibah yang penyalurannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan yang dilakukan dalam saran penunjang usaha budidaya rumput laut.



Gambar 4.8. Struktur Organisasi Kelompok Pembudidaya Rumput Laut

Ketua kelompok menjalankan fungsi pengawasan koordinasi. Untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan pola hidup kerjasama, memudahkan proses *monitoring* dan menguatkan posisi tawar pembudidaya dalam kompetisi pasar, maka pembudidaya dikelompokkan dalam KUB dan diketuai oleh salah seorang ketua yang diangkat atas kesepakatan seluruh anggota kelompok, dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara kelompok.

Pendampingan dilakukan kepada tenaga pendamping yang ditunjuk oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi. Dalam upaya pemberdayaan kelompok pembudidaya, tenaga pendamping bekerjasama dengan lembaga terkait untuk melatih kemampuan manajemen usahadan pengelolaan keuangan, sehingga nelayan pembudidaya mampu mengelola usahanya, selain itu pula dalam kondisi persaingan pasar yang kompetitif pembudidaya mencari alternatif pasar yang mampu membeli rumput laut dengan harga bersaing serta mengajak pembudidaya untuk mampu mengelola pendapatan guna peningkatan kesejahteraannya.

Gibson (1997) mengatakan bahwa struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan hubungan di antara berbagai subunit dalam organisasi. Dua aspek penting dari struktur organisasi adalah desain pekerjaan dan desain organisasi. Desain pekerjaan mengacu pada proses yang digunakan para pemimpin atau manajer untuk merinci isi, metode dan hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu. Sedangkan desain organisasi menunjukkan keseluruhan struktur organisasi.

Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi, maka seorang pemimpin atau manajer harus memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur organisasi. Dengan memandang suatu bagan organisasi, kita hanya bisa melihat suatu susunan posisi, tugas-tugas pekerjaan dan garis wewenang dari bagian-bagian dalam organisasi. Akan tetapi struktur organisasi lebih rumit daripada yang digambarkan dalam bagan tersebut.

Struktur organisasi menggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan antar orang dan antar kelompok.

Setiawan (2003) mengatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya karena situasinya berbeda. Struktur organisasi ada kaitannya dengan tujuan, sebab struktur organisasi adalah cara organisasi itu mengatur dirinya untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya.

Mencermati kondisi yang terjadi di lapangan terhadap struktur organisasi program PUMP-PB, sebenarnya secara konsep telah sesuai dengan kaidah organisasi. Namun dalam implementasinya belum dapat berfungsi sesuai tugas dan peran dari masing-masing bagian yang terlibat dalam struktur tersebut. Hal ini berakibat pada tidak efisiennya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program PUMP tersebut, bahkan status dalam organisasi tersebut hanya bersifat simbolistis. Dari hasil wawancara terhadap UPP misalnya, didapatkan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam pendampingan terhadap kelompok pembudidaya, walaupun secara struktur organisasi mereka berperan sebagai pendamping. Demikian halnya dengan instansi terkait, belum sepenuhnya bertanggungjawab dan rasa memiliki serta mengambil bagian dalam proses koordinasi terhadap kelancaran kerjasama melalui program PUMP-PB tersebut.

Selain itu, dari struktur yang dianalisis belum sepenuhnya memberikan kesempatan atau akses kepada kelompok pembudidaya untuk melakukan relasi langsung dengan instansi atau lembaga dalam proses penguatan kelembagaan tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa semua kegiatan dari KUB hanya diperankan oleh ketua kelompok. Anggota KUB hanya mengandalkan faktor

kepercayaan kepada ketua kelompok, padahal mekanisme seperti ini tidak sepenuhnya bisa diandalkan dalam memperkuat *bargaining position* dalam memberdayakan usahanya.

G. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan PUMP-PB

Dalam pelaksanaan program kerjasama PUMP-PB di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya di Kecamatan Kei Kecil yang akan disoroti adalah pelaksanaan kegiatan pada semua tahapan program. Tahapan-tahapan yang akan ditelaah adalah: sosialisasi program, operasional kegiatan, kegiatan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Penjelasan dari masing-masing tahapan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Program PUMP-PB

Tujuan dari sosialisasi adalah agar seluruh pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dapat memahami, mengenal, membantu dan menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan secara lancar dan mencapai tujuan secara optimal. Proses sosialisasi dalam bentuk pendampingan kepada pembudidaya ikan peserta PUMP-PB merupakan kegiatan yang penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, karena tanpa adanya pendamping maka sudah dapat dipastikan kemampuan dan keterampilannya rendah, wawasan manajemennya sempit, pola kerjanya kurang efisien, usahanya tidak produktif dan keuntungannya sedikit.

Sosialisasi kegiatan PUMP-PB yaitu orientasi lapangan guna memberikan penjelasan tentang tujuan dilaksanakannya PUMP-PB kepada masyarakat kelompok pembudidaya ikan peserta kegiatan ini. Disamping itu penerangan lainnya seperti ketentuan dan persyaratan menjadi peserta PUMP-PB, cara memperoleh dan memanfaatkan BLM untuk modal usaha, sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal serta motivasi untuk bekerja keras agar keluar dari jeratan kemiskinan.

Oleh karena itu pembudidaya rumput laut peserta PUMP-PB senantiasa didampingi oleh tenaga pendamping (PPTK yang ditugaskan BPSDM/Pusbangluh-KP) untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dibidang budidaya dan sikap prilaku yang baik agar usahanya bisa maju dan mandiri.

Agar pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan persiapan yang meliputi : 1) identifikasi sasaran sosialisasi yang disesuaikan dengan jenjang pelaksanaannya, 2) identifikasi dan penentuan media sosialisasi yang digunakan, yaitu melalui kegiatan lokakarya dan diskusi/temu wicara, 3) penyiapan materi/bahan pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan media sosialisasi program yang akan digunakan.

Hasil penelitian proses sosialisasi program PUMP-PB di Kabupaten Maluku Tenggra khususnya Kecamatan Kei Kecil untuk Tahun 2012 di dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan, sebagai TIM teknis di bantu oleh tenaga pendamping yang diangkat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sangat dipahami karena program PUMP-PB masih merupakan hal yang baru dan masih perlu dipahami lebih jauh oleh dinas berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Maluku Tenggra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas, mereka mengakui bahwa awal pembentukan PUMP-PB di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat banyak kekurangannya. Sementara materi sosialisasi telah dilakukan berdasarkan pedoman teknis (Pednis) PUMP-PB Tahun 2011 dan sesuai rencana. Waktu sosialisasi yang direncanakan untuk Tahun 2011 selama kurang lebih 2 bulan yakni pada bulan Februari dan Maret. Dari hasil wawancara kepada Pokdakan, ternyata proses sosialisasi yang dilakukan masih terasa kurang, terutama bagi yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka belum sepenuhnya memahami kerjasama yang dibangun melalui program tersebut.

2. Operasionalisasi Kegiatan

Menyadari bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dengan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya, maka pemerintah melalui departemen kelautan dan perikanan mengucurkan program Pemberdayaan masyarakat. Sasaran utamanya adalah masyarakat pesisir yang memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai sumber pendapatannya. Pelaksanaan kemitraan usaha melalui program PUMP-PB yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara berlangsung sejak Tahun 2001.

PNPM Mandiri KP merupakan upaya kegiatan pemberdayaan diantaranya melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Pokdakan merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PUMP-PB untuk penyaluran bantuan

modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUMP-PB, Pokdakan didampingi oleh Tenaga Pendamping (Penyuluh atau PPTK) serta peningkatan ketrampilan. Melalui pelaksanaan PUMP-PB diharapkan Pokdakan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola pembudidaya ikan.

Untuk mencapai tujuan PUMP-PB, yaitu mendorong peningkatan produksi, menumbuhkan wirausaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di perdesaan, PUMP-PB dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan KKP maupun Kementerian/Lembaga lain di bawah payung program PNPM Mandiri. Disamping itu, program PUMP-PB diupayakan juga dapat mendukung kegiatan pembangunan kawasan minapolitan khususnya minapolitan perikanan budidaya.

Dengan demikian kegiatan PUMP-PB diharapkan akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan pada tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya

Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Budidaya adalah :

- a. Mendorong upaya peningkatan produksi, nilai tambah komoditas dan tumbuhnya wirausaha baru dibidang perikanan budidaya.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara berkelanjutan melalui pengembangan wirausaha dibidang perikanan budidaya.

- c. Meningkatkan fungsi kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang kuat serta membangun jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam akses permodalan usaha perikanan budidaya.

Program PUMP-PB diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. Operasional kegiatan PUMP-PB, yang terbangun sejak tahun 2011 difasilitasi oleh dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, dan berdasarkan Pendis PUMP-PB, dimana Dinas kelautan dan perikanan Malra mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), 2) Melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, 3) Melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi, rekapitulasi data calon kelompok penerima BLM PUMP-PB dituangkan dalam Berita Acara, 4) Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya guna pencairan BLM. 5) Menyampaikan KAK, RUK, RUB dan dokumen administrasi kepada Tim Pembina melalui surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 6) Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan 7) Melakukan pemantauan pemanfaatan BLM PUMP-PB oleh Pokdakan untuk usaha budidaya ikan.

Penyaluran BLM PUMP-PB berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melalui prosedur swakelola kepada kelompok masyarakat (Pokdakan), yang pelaksanaannya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok itu sendiri dengan bimbingan

dan pembinaan dari Tenaga Pendamping dan dipantau oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Kegiatan Pembinaan

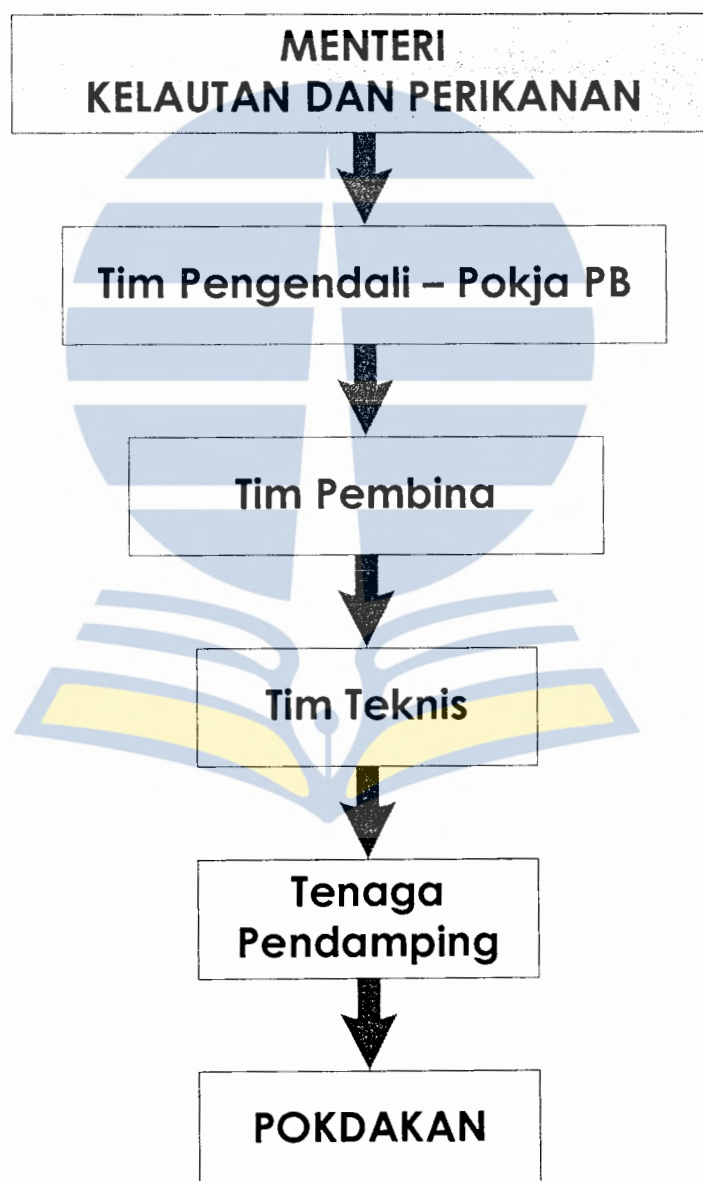
Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUMP-PB, Tim Pengendali melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Pokja-PB. Dalam melakukan pembinaan teknis usaha produktif kepada usaha ekonomi dominan yang dijalankan kelompok sesuai dengan pedoman teknis PUMP-PB yang disusun Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Pembinaan pelaksanaan PUMP-PB dilakukan oleh Tim Pembina kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan kepada: (i). menjamin penyampaian KAK, RUK, RUB dan dokumen administrasi lainnya dari Kabupaten/Kota kepada Tim Pengendali tepat waktu, (ii). melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pembinaan pelaksanaan PUMP-PB oleh Tim Teknis dilakukan: (i). menjamin penyampaian KAK, RUK, RUB dan dokumen administrasi lainnya dari Pokdakan kepada Tim Pembina tepat waktu, (ii). melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menjamin pelaksanaan PUMP-PB dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Tim Pengendali membentuk layanan informasi masyarakat untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

Pengendalian terhadap PUMP-PB dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen Kelompok, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUMP-PB dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9. Alur Pembinaan dan Pengendalian PUMP-PB

Tim Pengendali dan Pokja PB melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUMP-PB melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis serta kebijakan umum Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Tim Pembina melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUMP-PB melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan Pokdakan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tim Teknis melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUMP-PB melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PUMP-PB, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sejak dari tahap persiapan, penentuan Kelompok, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM serta memberikan saran-saran perbaikan. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, KKP menyediakan layanan pengaduan yang dialamatkan kepada Inspektorat Jenderal KKP dan tembusan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Pembinaan untuk kelompok pembudidaya pada awalnya oleh Tim teknis yakni tenaga pendamping dan dari dinas perikanan dan kelautan kabupaten Maluku Tenggara, tetapi belum dilaksanakan secara konsisten, Sejak bulan pertama dan kedua pelaksanaan program PUMP-PB, kondisi kelompok masih berjalan sesuai

yang diharapkan. Tetapi kemudian kondisi kelompok menjadi tidak berfungsi sebagaimana layaknya kelompok. Di sisi lain kita ketahui bahwa perubahan perilaku nelayan akan membutuhkan waktu yang lama.

Proses perubahan sumberdaya manusia (kelompok pembudidaya) peserta kerjasama PUMP-PB melibatkan banyak usaha dan tenaga. Usaha-usaha pendidikan yang lazim dikenal dengan nama pembinaan, yang di dalamnya tidak lain adalah kegiatan proses komunikasi persuasif, merupakan salah satu faktor yang dapat memainkan peranan penting dalam menimbulkan perubahan sumberdaya manusia.

Keterlibatan pembudidaya sebagai pengelola sumberdaya perikanan laut tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama pemilihan lapangan pekerjaan yaitu memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pembudidaya merupakan *human investment* yang jika dimanfaatkan dengan maksimal dan disertai dengan pengalokasian yang serasi akan memberikan pengaruh terhadap perbaikan hidup dan peningkatan hasil usaha.

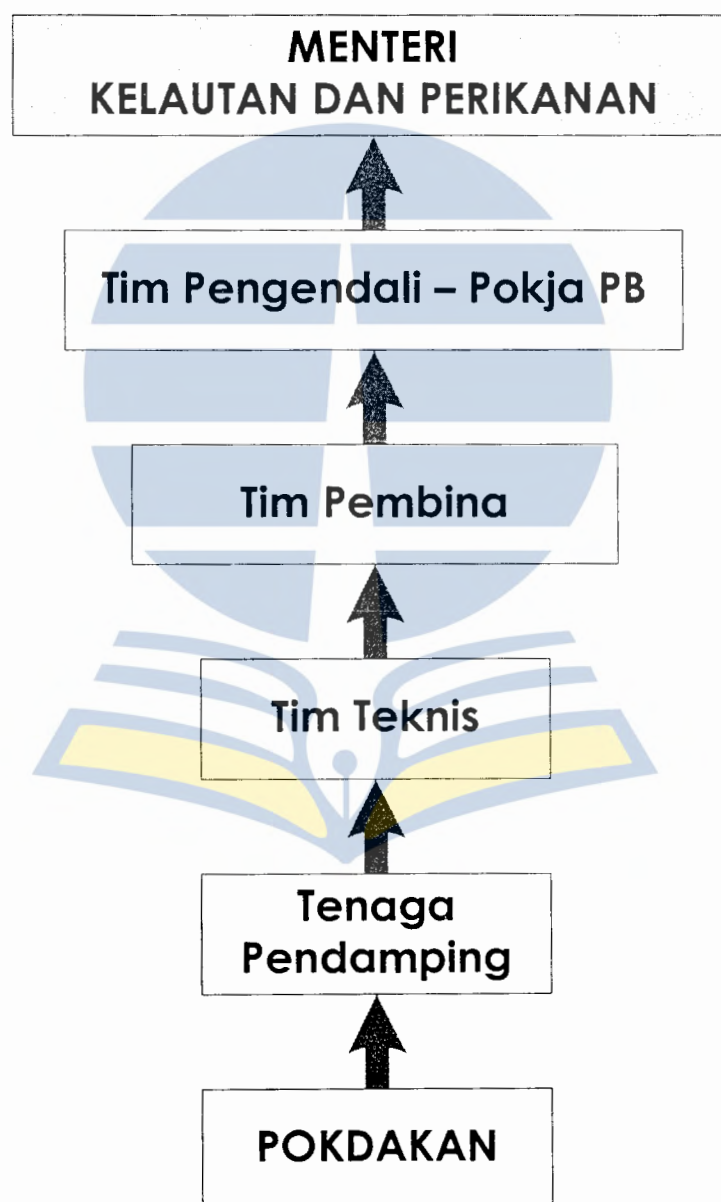
Pembinaan adalah suatu sistem pendidikan non formal untuk mengubah perilaku (pengetahuan, sikap dan ketrampilan), agar mampu berperan sesuai dengan kedudukannya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Pembinaan terhadap kelompok pembudidaya dimaksudkan untuk meningkatkan produksi hasil budidayanya baik kuantitatif maupun kualitatif dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya. Selain itu pembinaan kelompok pembudidaya juga adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya dalam pengetahuan teori dan ketrampilan usaha.

Berdasarkan kenyataan, hasil penelitian tentang kurangnya pembinaan yang terjadi terhadap kelompok pembudidaya, menyebabkan saling tidak percaya antara anggota kelompok dan ketua kelompok, bahkan terhadap TIM teknis (tenaga Pendamping dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Maluku Tenggara). Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dibuat rencana kerja kelompok dengan jelas, pertemuan-pertemuan kelompok dan hak serta kewajiban setiap anggota kelompok. Sesuai pendapat Anwar (1997) mengatakan untuk mengatasi sifat pembonceng (*free rider*) baik dalam sumberdaya alam maupun kelompok, maka harus dibuat pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara setiap anggota kelompok. Beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk membenahi kelompok antara lain merealisasikan dan mengembangkan tugas dan peran kelompok sekaligus memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) kelembagaan kelompok tersebut untuk masa yang akan datang, diantaranya: 1). Pemilihan ketua kelompok dilakukan oleh semua anggota kelompok dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh mitra. 2). Memberikan kewajiban/tanggungjawab yang jelas kepada ketua kelompok agar dapat dilakukan evaluasi. 3). Menggali potensi sosial yang berkembang pada masing-masing peserta dan mengembangkannya di dalam kelompok.

4. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUMP-PB dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pengendali, Pokja PB, Tim Pembina dan Tim Teknis yang mencakup evaluasi awal dan evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir. Pelaporan pelaksanaan kegiatan PUMP-PB disampaikan secara berjenjang oleh Pokdakan,

Tenaga Pendamping, Tim Teknis, Tim Pembina, Pokja PB dan Tim Pengendali, serta secara berkala (bulanan, semester, dan akhir tahun), dan format laporan mengacu pada peraturan yang berlaku. Secara rinci alur pelaporan PUMP-PB dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10. Alur Pelaporan PUMP-PB

Agar program PUMP-PB dapat mencapai tujuannya, maka dalam proses pelaksanaannya dibutuhkan kegiatan *monitoring* dan *evaluasi*. Kegiatan ini seyogyanya dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan sebagai pembina dalam program kerjasama ini yang sesuai dengan pedoman teknis program PUMP-PB adalah TIM teknis.

Monitoring program PUMP-PB dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kendala dan rencana tindak lanjut. Monitoring dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, dalam hal ini kelompok masyarakat pembudidaya maupun masyarakat umum. Mereka dapat mengadakan penyimpangan pelaksanaan program PUMP-PB kepada penanggung jawab operasional yang dilakukan ditingkat daerah.

Indikator kinerja dalam evaluasi program PUMP-PB yang terbangun antara dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dan kelompok masyarakat pembudidaya (pokdakan), mencakup: 1) tersosialisasinya program PUMP-PB kepada pihak terkait. 2) tersalurkannya dana bantuan dalam bentuk hibah kepada Kelompok masyarakat pembudidaya secara tepat jumlah, waktu dan sasaran sesuai dengan usulan kegiatan yang disetujui. 3) berjalannya pembinaan dan pengawasan kegiatan PUMP-PB.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap semua tahapan kegiatan, belum dilaksanakan secara baik. Hal ini berdampak terhadap keberlanjutan program tersebut. Tidak berjalannya proses monitoring dan evaluasi sebagaimana yang diharapkan dalam pedoman teknis PUMP-PB juga mengakibatkan berbagai masalah yang dihadapi oleh Kelompok pembudidaya itu

sendiri tidak dapat tertangani dengan baik. Sebagai contoh, pembagian bantuan dalam bentuk sarana prasarana budidaya yang tidak seragam seperti jumlah tali bentangan yang tidak seragam, ukuran dan jenis sampan yang tidak sesuai, akhirnya mendapat *complain* dari kelompok pembudidaya Ubun Vuan desa Ohiobadar, dan belum mendapat tanggapan secara serius, hal ini mengakibatkan beberapa pembudidaya tidak menggunakan fasilitas bantuan tersebut.

H. Bentuk Dan Strategi Kerjasama Kelembagaan PUMP-PB

Pola kerjasama kelembagaan adalah pola kerjasama inti plasma. Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Maluku Tenggara sebagai Tim Teknis yang memfasilitasi pemberian bantuan kepada Pokdakan sebagai plasma.

Pola Koordinasi yang diterapkan dalam program PUMP-PB ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Integrasi vertikal

Pola koordinasi kelembagaan *integrasi vertikal* memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya adalah kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan akan lebih mudah dan efektif sebagai akibat terpusatnya dan seragamnya jenis informasi yang diterima. Kelemahan dari pola ini yakni pada kondisi organisasi yang melibatkan banyak orang dan jenjang panjang akan mengakibatkan keputusan yang diambil terlambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Jalur informasi yang dilalui panjang sehingga sebagian informasi telah hilang (*missing information*).

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Brinkenhorf *et al.* (1990) bahwa faktor yang menentukan keberhasilan suatu institusi yang pertama

adalah aliran informasi antara “*stakeholders*” institusi. Informasi yang *asymetri* merupakan penyebab utama mengapa keragaan institusi menjadi lemah. Kedua adalah struktur sistem dalam institusi tersebut. Struktur sistem menjadi penting karena struktur sistem mempengaruhi insentif dan perilaku. Struktur sistem juga mempengaruhi aliran informasi dan informasi berkaitan erat dengan biaya transaksi.

Keburukan yang juga terjadi dalam penggunaan pola koordinasi *integrasi vertikal* adalah pada kegiatan/aktivitas yang mengejar keuntungan (*profit taking*) akan menyebabkan terjadinya penghisapan oleh mitra terhadap kelompok pembudidaya. Dengan menerapkan koordinasi integrasi vertikal pihak mitra dapat mengatur segala keinginannya dan sebaliknya pihak kelompok pembudidaya mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap mitra. Akibat dari kondisi tersebut, pihak kelompok pembudidaya akan mengikuti sepenuhnya semua keputusan mitra baik dalam pengaturan bantuan sarana produksi, maupun harga input dan output yang diterima oleh kelompok pembudidaya.

Dari uraian di atas dan bila dikaitkan dengan karakteristik pokdakan yang berorientasi bisnis (mencari keuntungan) dan karakteristik usaha budidaya yang memiliki resiko usaha yang tinggi akibat faktor musim dan resiko pesaing, maka pola koordinasi integrasi vertikal yang diterapkan kurang tepat dan akan merugikan kelompok pembudidaya.

2. Koordinasi kooperatif formal

Hubungan kerjasama atau koordinasi yang bersifat *koperatif formal* terlihat pada hubungan kerjasama antara mitra dengan kelembagaan/instansi pemerintah

seperti, bank dan instansi terkait lainnya. Pola hubungan kerjasama dilakukan hanya dengan Tenaga Pendamping yang berfungsi untuk melakukan pelatihan teknis budidaya, penumbuhan kelompok, Pengelolaan Keuangan kelompok dan pembinaan manajemen usaha. Dari hasil penelitian ternyata pola koordinasi ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak kepada kesulitannya nelayan dalam memasarkan rumput laut kering mereka terutama pada saat panen.

3. Koordinasi aliansi strategis

Koordinasi yang bersifat aliansi strategis (*strategic alliancy*) merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan azas menggunakan fasilitas bersama. Pada dasarnya yang bersekutu saling berkepentingan terhadap fasilitas tertentu dan dapat memanfaatkannya bersama. Bila salah satu dari mereka keluar dari persekutuan tersebut, maka akan dirugikan.

Pola kerjasama yang dibangun antara pokdakan dengan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara selaku Tim teknis adalah bersifat aliansi strategis. Sesuai dengan perjanjian kerjasama dimana pihak mitra menyerahkan sepenuhnya kepada tenaga pendamping untuk melakukan fungsinya dalam hal bimbingan teknis dan pelatihan serta menyediakan pasar bagi kelompok pembudidaya rumput laut. Insentif yang diterima oleh pihak tenaga pendamping adalah dana untuk kelancaran fungsi tersebut. Sedangkan bagi pihak pokdakan dengan adanya kerjasama ini, semakin berkurangnya beban pekerjaan. Keadaan ini menunjukkan adanya persekutuan antara kedua belah pihak tersebut, yang bila salah satu mundur, maka akan dirugikan.

Koordinasi yang dilakukan oleh kedua mitra dengan kelembagaan kelompok pembudidaya juga termasuk dalam *aliansi strategis*. Hal ini nampak dari adanya ketergantungan bersama terhadap kelangsungan dari proyek PUMP-PB tersebut. Pihak mitra mempunyai tugas mencapai tujuan proyek, sedangkan Kelompok pembudidaya mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan proyek agar pendapatannya meningkat yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan kelompok pembudidaya tersebut. Dari uraian tersebut di atas terlihat adanya kebutuhan bersama terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan dan bila salah satu keluar dari aliansi tersebut, maka akan ada yang dirugikan. Hal inilah yang merupakan salah satu ciri pokok dari koordinasi yang bersifat aliansi strategis.

4. Koordinasi sistem kontrak

Sistem kontrak (*contract system*) merupakan pola kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bekerjasama. Secara formal ciri dari kerjasama dengan sistem kontrak tersebut adalah adanya pihak ketiga sebagai peralai yang umumnya berasal dari lembaga hukum. Ciri lainnya dari sistem kontrak ini adalah adanya batasan jumlah fisik, kualitas dan batasan waktu yang tegas. Pada program PUMP-PB yang difasilitasi oleh dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara sistem kontrak hanya terjadi sesuai perjanjian dengan kelompok pembudidaya bahwa dana BLM adalah merupakan dana hibah. Hal yang merinci dari kerjasama antar kedua belah pihak tersebut yaitu adanya spesifikasi barang yang diperlukan yakni, adanya syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi, adanya jangka waktu pelaksanaan dan sanksi kepada pihak yang tidak menepatinya.

Berdasarkan uraian tentang pola koordinasi yang diterapkan dalam Program PUMP-PB antara KUB dan Dinas Kabupaten Maluku Tenggara maka sebenarnya pola koordinasi yang mesti diterapkan berdasarkan kesepakatan melalui kontrak perjanjian adalah kelembagaan koordinasi *aliansi strategis*. Tetapi kenyataan di lapangan ternyata pola ini tidak dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan terputusnya koordinasi antara KUB dengan pihak dinas kelautan dan perikanan sebagai Tim Teknis yang sebenarnya memiliki peran yang besar dalam hal pembinaan terhadap pokdan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pola koordinasi kelembagaan lebih cenderung pada pola *integrasi vertikal*. Hal ini terlihat dengan adanya keputusan yang diambil harus melewati jenjang sesuai dengan garis koordinasi dari KUB, tenaga pendamping desa, yang bertugas di dalam mengkoordinasi kegiatan proyek kemitraan tersebut, tidak dapat mengambil keputusan yang mendesak ketika menemui hambatan di lapangan terhadap berbagai masalah seperti terjadinya ketidakseragaman saranaprasarana bantuan budidaya yang diberikan bagi kelompok pembudidaya dalam melakukan usaha budidaya rumput laut. Tenaga pendamping harus mendapat persetujuan dari jenjang yang di atasnya, olehnya memerlukan waktu dan proses yang panjang sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas dari kelompok pembudidaya.

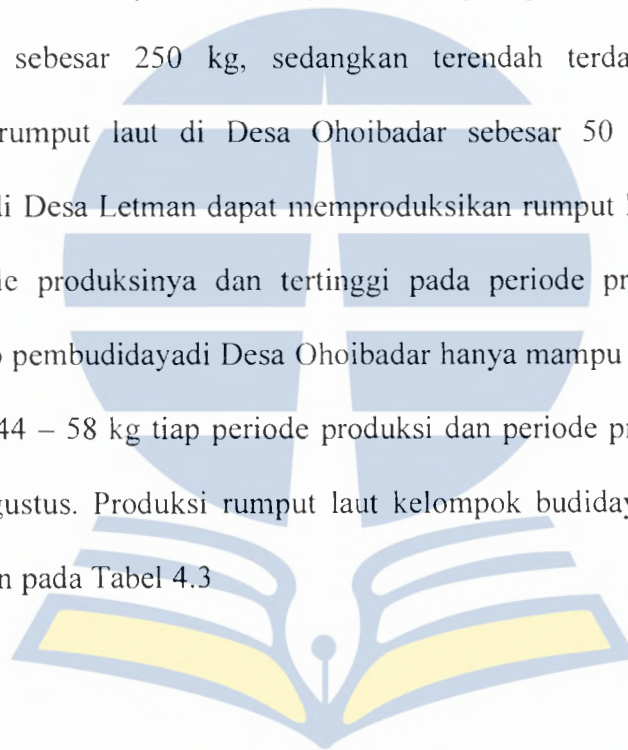
I. Kinerja Kelembagaan PUMP-PB

Analisis tentang pendapatan pembudidaya, biaya transaksi, indikator keberhasilan, serta partisipasi dan persepsi peserta kerjasama PUMP-PB dilakukan

untuk mengetahui kinerja kelembagaan kerjasama. Hasil analisis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Kelompok Pembudidaya

Periode budidaya rumput laut yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya di Desa Letman, Desa Sathean, Desa Letvuan, dan Desa Ohoibadar dari bulan Januari hingga Agustus 2012 menghasilkan total produksi sebesar 6,800 kg atau 6,8 ton. Rata-rata produksi tertinggi terdapat pada kelompok pembudidaya rumput laut di Desa Letman sebesar 250 kg, sedangkan terendah terdapat pada kelompok pembudidaya rumput laut di Desa Ohoibadar sebesar 50 kg (Tabel 4.3). Tiap pembudidaya di Desa Letman dapat memproduksi rumput laut sebanyak 58 - 99 kg tiap periode produksinya dan tertinggi pada periode produksi bulan Maret. Sedangkan tiap pembudidaya di Desa Ohoibadar hanya mampu memproduksi rumput laut sebanyak 44 – 58 kg tiap periode produksi dan periode produksi terbaik hanya pada bulan Agustus. Produksi rumput laut kelompok budidaya di Kecamatan Kei Kecil disajikan pada Tabel 4.3



Tabel 4.3. Produksi Rumput Laut Kelompok Budidaya

Responden	Desa Letman	Desa Sathean	Desa Letvuan	Desa Ohoibadar
1	274	243	261	123
2	285	170	325	35
3	230	130	233	27
4	236	164	216	41
5	261	127	264	36
6	264	117	207	52
7	246	144	188	57
8	229	159	213	46
9	235	119	186	49
10	240	127	207	34
Rataan	250	150	230	50
Jumlah	2,500	1,500	2,300	500

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Untuk memproduksi rumput laut tersebut rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya berkisar antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,- tiap periode produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut adalah untuk biaya pengingat bibit rumput laut, biaya perawatan dan pengawasan selama usaha budidaya, dan biaya pemanenan rumput laut. Total biaya yang dikeluarkan selama setahun adalah sebesar Rp. 18.000.000,-, sesuai dengan aktivitas berproduksi maka biaya produksi tertinggi terdapat di Desa Letman dan terendah di Desa Ohoibadar. Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh pembudidaya adalah Rp. 150.000,- hingga Rp. 550.000,- per tahun (periode Januari hingga Agustus).

Tabel 4.4. Biaya Produksi Rumput Laut Kelompok Budidaya

Responden	Desa Letman	Desa Sathean	Desa Letvuan	Desa Ohoibadar
1	550,000	550,000	550,000	350,000
2	550,000	550,000	550,000	150,000
3	550,000	550,000	550,000	150,000
4	550,000	550,000	550,000	150,000
5	550,000	550,000	550,000	150,000
6	550,000	550,000	550,000	150,000
7	550,000	550,000	550,000	150,000
8	550,000	550,000	550,000	150,000
9	550,000	550,000	550,000	150,000
10	550,000	350,000	550,000	150,000
Rataan	550,000	530,000	550,000	170,000
Jumlah	5,500,000	5,300,000	5,500,000	1,700,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Dengan harga jual rumput laut relatif stabil pada harga Rp 10.000/kg dari bulan Januari hingga Agustus 2012 diperoleh nilai produksi atau penerimaan usaha budidaya rumput laut sebesar Rp 68.000.000,-. Penerimaan tertinggi terdapat di Desa Letman dan terendah di Desa Ohoibadar (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Nilai Produksi Rumput Laut Kelompok Budidaya

Responden	Desa Letman	Desa Sathean	Desa Letvuan	Desa Ohoibadar
1	2,740,000	2,430,000	2,610,000	1,230,000
2	2,850,000	1,700,000	3,250,000	350,000
3	2,300,000	1,300,000	2,330,000	270,000
4	2,360,000	1,640,000	2,160,000	410,000
5	2,610,000	1,270,000	2,640,000	360,000
6	2,640,000	1,170,000	2,070,000	520,000
7	2,460,000	1,440,000	1,880,000	570,000
8	2,290,000	1,590,000	2,130,000	460,000
9	2,350,000	1,190,000	1,860,000	490,000
10	2,400,000	1,270,000	2,070,000	340,000
Rataan	2,500,000	1,500,000	2,300,000	500,000
Jumlah	25,000,000	15,000,000	23,000,000	5,000,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Rata-rata penerimaan usaha budidaya rumput laut pada periode produksi pertama (bulan Januari - Maret) adalah sebesar Rp. 432.000,- hingga Rp. 987.000,- pada tiap nelayan/pembudidaya, periode produksi kedua (bulan Juni – Agustus) adalah sebesar Rp. 580.000,- hingga Rp. 931.000,- tiap nelayan/pembudidaya, dan periode produksi ketiga (bulan Agustus) adalah sebesar Rp. 442.000 hingga Rp. 582.000,- tiap nelayan/pembudidaya.

Dari penerimaan tersebut maka pendapatan total yang diperoleh usaha budidaya rumput laut di empat desa tersebut adalah Rp 50.000.000,-/tahun. Atau selama satu tahun produksi tiap kelompok nelayan/pembudidaya dapat memperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp. 330.000,- hingga Rp. 1.950.000,- per tahun (Tabel 4.6).

Tabel 4.6. Pendapatan Kelompok Usaha Budidaya Rumput Laut

Responden	Desa Letman	Desa Sathean	Desa Letvuan	Desa Ohoibadar
1	2,190,000	1,880,000	2,060,000	880,000
2	2,300,000	1,150,000	2,700,000	200,000
3	1,750,000	750,000	1,780,000	120,000
4	1,810,000	1,090,000	1,610,000	260,000
5	2,060,000	720,000	2,090,000	210,000
6	2,090,000	620,000	1,520,000	370,000
7	1,910,000	890,000	1,330,000	420,000
8	1,740,000	1,040,000	1,580,000	310,000
9	1,800,000	640,000	1,310,000	340,000
10	1,850,000	920,000	1,520,000	190,000
Rataan	1,950,000	970,000	1,750,000	330,000
Jumlah	19,500,000	9,700,000	17,500,000	3,300,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Tiap kelompok budidaya di Desa Letman memperoleh pendapatan sebanyak Rp. 432.000,- hingga Rp. 787.000,- tiap periode produksi, sedangkan kelompok

budidaya di Desa Sathean adalah Rp. 228.000,- hingga Rp. 500.000,-, kelompok budidaya di Desa Letvuan adalah Rp. 482.000,- hingga Rp. 612.000,-, kemudian kelompok budidaya di desa Ohoibadar adalah Rp. 292.000,- hingga Rp. 380.000,-. Terlihat bahwa pendapatan kelompok usaha budidaya di Desa Letman memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

2. Biaya Transaksi

Salah satu ukuran baik buruknya kinerja kelembagaan kerjasama dapat ditelaah dari biaya-biaya transaksi yang terjadi di dalamnya. Makin kecil biaya transaksi, maka kinerja kerjasama tersebut makin efisien. Biaya transaksi (*transaction cost*) merupakan ciri utama dari aktivitas ekonomi yang tidak berlangsung melalui pasar bebas (*spot market*). Schmid (1987) membedakan biaya transaksi menjadi biaya kontraktual (*contractual cost*), biaya informasi (*information cost*) dan biaya kebijakan (*policing cost*). Menurut Williamson (1985) biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kelancaran aktivitas ekonomi dan tidak termasuk dalam biaya produksi. Biaya transaksi itu sendiri dapat muncul diawal sebelum transaksi (*ex ante*) dan setelah transaksi terjadi (*ex post*). Biaya-biaya yang melancarkan aktivitas ekonomi seperti insentif, hadiah dan biaya-biaya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran administrasi dan kelancaran koordinasi termasuk juga dalam biaya transaksi.

Hasil penelitian terhadap biaya transaksi pada progra melalui program PUMP-PB memperlihatkan bahwa biaya transaksi oleh TIM Teknis berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan tahun berjalannya proyek tersebut, terdiri atas biaya

identifikasi potensi, monitoring dan evaluasi, biaya sosialisasi, serta biaya pembentukan KUB. Besarnya biaya transaksi tersebut sebesar Rp. 10.000.000 per KUB. Sementara biaya transaksi yang dikeluarkan oleh KUB selama berlangsungnya kerjasama sebesar Rp. 3.500.000,-.

Besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan ini tentu lebih mengutamakan efisiensi investasi pada kegiatan yang dilakukannya. Karena dinas kelautan dan perikanan dalam hal ini TIM teknis bukan merupakan perusahaan swasta, sehingga keuntungan ekonomi bukan merupakan faktor yang diprioritaskan pada tujuan akhir dari kegiatan tersebut, melainkan keuntungan sosial yang diutamakan. Hal ini berbeda dengan kegiatan yang dibangun oleh perusahaan swasta dimana lebih menitikberatkan pada keuntungan ekonomi akhir dari kegiatan yang dilakukannya. Terdapat perbedaan antara pelaksana proyek yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, hal ini dapat menyebabkan keterikatan dan koordinasi yang berbeda sehingga dapat membedakan biaya koordinasi/administrasi. Bila pelaksananya pemerintah, mungkin efisiensi investasi bukan merupakan tujuan utama yang diinginkan, melainkan lebih mengarah pada keuntungan sosial yang akan dihasilkan. Sebaliknya bila swasta sebagai pelaksana proyek lebih mengutamakan efisiensi investasi dengan tujuan akhir adalah keuntungan (*private profit*) yang tinggi. Implikasinya, agar memperoleh keuntungan yang besar, pihak swasta tentu akan berupaya untuk memperkecil biaya administrasi dengan memperpendek urusan administrasi atau memperkecil biaya sosial melalui “penghisapan” terhadap pembudidaya.

3. Indikator Keberhasilan

Ukuran - ukuran yang menjadi indikator keberhasilan kerjasama yang terbangun melalui program PUMP-PB di Kecamatan Kei Kabupaten Maluku Tenggara belum dirumuskan secara tersurat. Namun berdasarkan penelusuran terhadap aspirasi dari setiap kelompok partisipan (kelompok Pembudidaya /KUB), TIM Teknis yakni dinas kelautan dan perikanan, tenaga pendamping desa dan instansi terkait lainnya, ternyata masing-masing memiliki ukuran tersendiri terhadap keberhasilan kerjasama melalui program PUMP-PB yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ukuran keberhasilan tersebut dibangun berdasarkan harapan-harapan yang diinginkan dalam program PUMP-PB tersebut. Rincian tentang indikator keberhasilan kerjasama bagi setiap partisipan disajikan pada Tabel 3. Nampak bahwa harapan atau aspirasi keberhasilan kerjasama di kalangan partisipan meskipun dalam beberapa hal memiliki kesamaan, tetapi terdapat pula beberapa perbedaan. Jika diasumsikan kedudukan setiap kriteria sama pentingnya bagi setiap kelompok partisipan maka pencapaian target dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dalam kerjasama dengan pembudidaya hanya sekitar 38,89 % Rendahnya pencapaian target ini disebabkan pembudidaya belum mampu mengembangkan usaha budidaya sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan Tabel 4.7, nampak bahwa harapan atau aspirasi keberhasilan kerjasama di kalangan partisipan meskipun dalam beberapa hal memiliki kesamaan, tetapi terdapat pula beberapa perbedaan. Jika diasumsikan kedudukan setiap kriteria sama pentingnya bagi setiap kelompok partisipan maka pencapaian target Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dalam kerjasama dengan

pembudidaya hanya sekitar 23,53 %. Rendahnya pencapaian target ini disebabkan pembudidaya belum mampu mengembangkan usaha secara baik.

Tabel 4.7. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Kerjasama Program PUMP-PB

No.	Kelompok Partisipan	Indikator Keberhasilan	Nilai
1	Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara	- Kelompok masyarakat pembudidaya dapat memanfaatkan dan memelihara bantuan secara baik dan bertanggung jawab.	4
		- Melalui kerjasama program PUMP-PB pembudidaya mampu dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga	2
2	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	- Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara melalui TIM teknis dapat memberikan pembinaan teknis maupun manajemen secara intensif dan sistematis	3
		- TIM teknis mampu bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyediakan pasar bagi pembudidaya	2
3.	Instansi terkait (Bank, TIM Teknis)	- Bantuan dalam Bentuk Hibah tidak hanya diberikan untuk kebutuhan tapi penyediaan sarana pasca panen bagi pengembangan usaha budidaya mesti menjadi perhatian	2
		- Bantuan bagi KUB, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang pada gilirannya dapat membantu pemenuhan kehidupan rumah tangga kelompok pembudidaya	4

Sumber : Data primer diolah (2012)

Ket : 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = kurang baik 2 = buruk 1 =sangat buruk

Sebenarnya yang menjadi harapan utama kelompok pembudidaya (KUB), adalah adanya pendapatan yang memadai. Hasil analisis pendapatan diperoleh bahwa, usaha budidaya rumput laut sebenarnya dapat merupakan usaha andalan yang dapat meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup, namun belum sepenuhnya dipahami oleh pembudidaya untuk usaha budidaya

rumput laut tersebut dapat diandalkan, dan bahkan bagi sebagi kelompok pembudidaya ketika harga rumput laut kering yang tidak stabil dan bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun akan membentuk presepsi pembudidya bahwa usaha tersebut semakin tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

Dari pihak instansi terkait harapan yang terealisasi terhadap kerjasama yang terbangun melalui program PUMP-PB hanya mencapai 35,29%. Rendahnya target yang tercapai, lebih disebabkan sikap dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Maluku Tenggara yang belum melaksanakan fungsinya secara baik. Hal ini lebih jauh berdampak pada ketidakmampuan kelompok pembudidya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya melalui kerjasama. Dengan demikian bila dilihat secara menyeluruh, maka keberadaan kerjasama program PUMP-PB ini belum memberi dampak yang optimal terhadap perbaikan pendapatan pembudidaya.

Penelaahan terhadap kriteria keberhasilan di atas, dapat dikatakan bahwa buruknya pendapatan kelompok pembudidya, disebabkan tidak berfungsinya pola kerjasama sebagaimana diharapkan dalam aturan main. Indikasi terhadap hal itu tercermin pada tidak berjalanya kegiatan pembinaan terutama dari dinas kelautan dan kelautan Kabupaten Maluku Tenggara. Pembudidaya tidak dipersiapkan secara matang untuk mengelola usaha mereka berdasarkan prinsip-prinsip manajemen rasional. Selain itu intervensi dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini TIM teknis terlalu kuat, sehingga potensi pembudidaya tidak teraktualisasi dengan baik. Kondisi tersebut secara akumulatif telah mempersulit terealisasinya harapan pembudidaya partisipan terhadap kerjasama program PUMP-PB tersebut.

4. Persepsi dan Partisipasi Peserta Kemitraan

Pada dasarnya seseorang sebelum berpartisipasi terhadap suatu obyek, akan didahului oleh persepsinya terhadap objek tersebut, kemudian baru muncul keterlibatan (partisipasinya). Kecenderungan seseorang berpartisipasi pada suatu objek, sangat dipengaruhi oleh kemauan, kemampuan serta kondisi lingkungannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan persepsi adalah pandangan atau opini dari kelompok masyarakat pembudidaya (pokdakan) yang dalam hal ini adalah pembudidaya terhadap prosedur pelaksanaan program kerjasama tersebut. Persepsi pembudidaya dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu persepsi baik kurang baik dan buruk. Persepsi yang baik ditunjukkan oleh pandangan yang mendukung prosedur pelaksanaan kegiatan, sedangkan persepsi yang kurang baik dan buruk menunjukkan penilaian-penilaian yang kurang mendukung program dan tidak mempunyai opini terhadap program. Sementara partisipasi merupakan keterlibatan nelayan dalam kegiatan yang dilakukan pada proyek kerjasama tersebut.

Dari ke-40 pembudidaya yang diwawancarai dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ada perbedaan persepsi di antara para pembudidaya peserta kemitraan. Sebanyak 29 peserta memiliki persepsi baik, sedangkan 11 peserta lainnya memiliki persepsi kurang baik dan buruk (tidak mendukung) mekanisme program pemberian bantuan dana hibah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.

Perbedaan persepsi ini disebabkan perbedaan latar belakang dari pembudidaya, situasi dan kondisi pembudidaya. Bila dikaji dari latar belakang, situasi dan kondisi pembudidaya di lokasi penelitian ternyata pengalaman dan

tingkat pendidikan akan turut mempengaruhi peserta dalam menanggapi proyek kerjasama tersebut. Persepsi dan partisipasi KUB disajikan pada Tabel 34.

Tabel 4.8. Persepsi dan Partisipasi KUB Pembudidaya Terhadap Program PUMP-PB

Prosedur	Persepsi			Partisipasi	
	Baik	Kurang Baik	Buruk	Jumlah	Persen
Pembentukan Kelompok	29	11	0	40	100
Pembinaan dan Pelatihan	27	13	0	38	95
Penyaluran bantuan	20	15	5	24	60

Sumber : Data primer diolah (2012)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta mendukung terhadap program dan prosedur kegiatan pembentukan kelompok, pembinaan dan pelatihan serta penyaluran bantuan. Peserta yang berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut sebesar 85%. Besarnya persepsi dan tingkat partisipasi dari peserta mengindikasikan bahwa mereka memiliki keinginan dan kesadaran untuk mengembangkan usaha budidaya mereka, sehingga lewat kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perubahan tingkat pendapatan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini juga ditunjang oleh tingkat pemahaman dari pembudidaya tersebut, karena pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya. Sementara yang tidak mendukung terhadap program dan prosedur pembentukan kelompok, pembinaan dan pelatihan serta penyaluran bantuan, disebabkan tingkat pemahaman yang masih rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola koordinasi yang dikembangkan dalam program PUMP-PB adalah bersifat integrasi vertikal, hal ini berakibat terhadap keputusan yang diambil bersifat *top down* dan selalu melalui proses yang berjenjang dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan.
2. Kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) yang dibentuk oleh tim teknis kurang sesuai dengan aspirasi pembudidaya rumput laut.
3. Berdasarkan uraian tugas dari masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam proram PUMP-PB, maka dari segi kewenangan tim teknis memiliki kewenangan yang lebih besar dari kelompok usaha bersama.
4. Dari segi kepemilikan pembudidaya memiliki hak terhadap segala paket bantuan yang diberikan, sementara dari segi aturan representasi hampir semua pengambilan keputusan dilakukan oleh tim teknis, sementara pembudiday (KUB) hanya menerima segala keputusan yang telah dibuat.
5. KUB program PUMP-PB belum sepenuhnya mendukung terhadap mekanisme penyaluran bantuan langsung.
6. Struktur organisasi program PUMP-PB secara konsep telah sesuai dengan kaidah organisasi. Namun dalam implementasinya belum dapat berfungsi sesuai tugas

dan peran dari masing-masing bagian yang terlibat dalam struktur tersebut. Hal ini berakibat pada tidak efisiennya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program PUMP, bahkan status dalam organisasi tersebut hanya bersifat simbolistis.

7. Kurangnya pembinaan yang terjadi terhadap kelompok pembudidaya, menyebabkan saling tidak percaya antara anggota kelompok dan ketua kelompok, bahkan terhadap TIM teknis
8. Monitoring dan evaluasi terhadap semua tahapan kegiatan, belum dilaksanakan secara baik. Hal ini berdampak terhadap keberlanjutan program tersebut. Tidak berjalannya proses monitoring dan evaluasi sebagaimana yang diharapkan dalam pedoman teknis PUMP-PB juga mengakibatkan berbagai masalah yang dihadapi oleh Kelompok pembudidaya itu sendiri tidak dapat tertangani dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, adalah:

1. Fungsi pengawasan, keterlibatan semua pihak pada semua tahapan, pelatihan manajemen usaha, teknis budidaya, pembinaan serta penyediaan pasar perlu dilakukan oleh TIM teknis kepada KUB.
2. Keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah desa hingga kecamatan, pemerintah terkait diperlukan agar menjamin keberlanjutan program dan usaha pembudidaya.
3. Pembinaan terhadap KUB oleh tim pendamping harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Rumayar, T.P., Femmi, N. F., Kemur, D dan I. K. Suwitra. 2005. Kajian budidaya rumput laut (*Eucheuma cottonii*) dengan sistem dan musim tanam berbeda di Kabupaten Bangkep Sulawesi Tengah. *Jurnal Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian* Vol. 8 No. 2, Juli 2005: 282 – 291.
- Anggadiredja, J.T., Zatnika, A dan S. Hadi. *Bisnis rumput laut fakta atau ilusi?*. 2008. [Makalah]. Disampaikan pada Pelatihan Lanjutan Program KKMB/BDS-P REWARD, Makassar, 4-7 Desember 2007
- Anwar A. 1995. Analisis Ekonomi Biaya-Biaya Transaksi. Makalah disajikan dalam Ceramah Umum Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Bogor:IPB. 24 hlm.
- Anwar A. 1997. Ekonomi Organisasi. Konsep Pilihan Aktivitas Ekonomi melalui Kelembagaan Pasar atau Organisasi. Bahan Kuliah. Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Bogor: Program Pascasarjana. IPB.12 hlm.
- Bank Indonesia. 2009. Budidaya Rumput Laut (Tali Letak Dasar). Direktorat Kredit, BPR dan UMKM. Bank Indonesia, Jakarta
- Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ, 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Dahuri, R. 2008. *Menjadikan akuakultur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan*. Makalah disampaikan dalam acara penerimaan anugerah MAI tanggal 8 – 12 Juli 2008 di Bandar Lampung.
- Direktorat Kesling DKP. 2005. Penyakit ice ice pada budidaya rumput laut. Petunjuk Pengendalian. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. DJPB, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta
- Ditjenkan Budidaya. 2004. Petunjuk Teknis Budidaya Laut:Rumput Laut *Eucheuma cottonii* spp. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- DJPB. 2010. *Tumbuhkan wirausaha tingkatkan produksi budidaya*. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta

- Doty, M.S. 1985. *Eucheuma alvarezii* sp.nov (Gigartinales, Rhodophyta) from Malaysia. in Abbot I.A and J.N. Norris (eds). *Taxonomy of Economic Seaweeds*. California Sea Grant College Program. p 37 – 45.
- Haeruman H, Eryatno, 2001. *Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC Indonesia. hlm. 79-101.
- Hendayana R, Wally F, 2003. Analisis Kelembagaan Pasar Input dan Output Usaha Ternak Rakyat. *Jurnal Soca* 8 (1): 45-47
- Hermanto F. 1993. *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya. hlm.23-25
- Hobbs JE. 1997. Measuring the Importance of Transaction Cost in Cattle Marketing. *American Journal Agricultural Economics*. 79 (4):1089-1095.
- Gibson JL. 1997. *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*. Djarkasih, penerjemah; Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: *Organizations*, 5th Edition. hlm.17-22
- KKP. 2010. *Buku Renstra 2010*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta
- Nikijuluw, V.P.H. 2010. *Minapolitan: A cluster approach for seaweed industry*. Makalah disampaikan pada Kegiatan SEABFEX III tanggal 14 – 17 Juli 2010 di Surabaya.
- Oak, Jung-Hyun., Park, Kwang-Seok., Kim, Jong-Gyu., You, Hack-Churl and Jin Ae Lee. 2010. *Seaweed for reducing global warming*. Makalah disampaikan pada Kegiatan SEABFEX III tanggal 14 – 17 Juli 2010 di Surabaya.
- Pemprov Maluku. 2010. *Rencana Pengembangan Klaster Rumput Laut di Provinsi Maluku*. Pemerintah Provinsi Maluku, Ambon.
- Pranadji T. 2003. *Penajaman Analisis Kelembagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian dan Pedesaan*. *Jurnal FAE* 21(1) : 12-25
- Puslitbangkan. 1991. *Petunjuk Teknis Budidaya Rumput Laut*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Jakarta
- Satria A. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo. hlm. 97-122.
- Schmid AA. 1987. *Property, Power and Public Choice. An Inquiry Into Law and Economics*. Second Edition. Praeger Publisher. New York. 76 p
- Setiawan I GD. 2003. *Kelompok, Organisasi & Kepemimpinan : Suatu Kumpulan Perkuliahan Ppn 617*. Bogor: Tirta Kencana Bogor. hlm. 65-67

- Soeharjo, A dan D. Patong. 1984. Sendi – Sendi Pokok Ilmu Usaha Tani. Lepas. UNHAS, Ujung Pandang.
- Sujatmiko, W dan W. I. Angkasa. 2008. Teknik Budidaya Rumput Laut dengan Metode Tali Panjang. <http://elib.pdii.lipi.go.id/>. Diakses tanggal 17 Nopember 2011.
- Sumaryadi NI. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama.hlm. 90-163
- Tampubolon J, Ginting B, Slamet M, Susanto J, Sumardjo. 2006. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jurnal Penyuluhan 2 (2): 10-22.
- TROBOS, 2010. Sesumbar jadi yang terbesar. Majalah TROBOS edisi Pebruari 2010
- Williamson, OE. 1985. Economic Institution of Capitalism Firm, Market, Rational Contracting. The Free Press Collier. MacMillan Publisher. London. 68 p
- Wiratno T, Tarigan A. 2002. Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal. Majalah Triwulan, Media Informasi, Profesi dan Komunikasi Perencanaan Pembangunan. No.28, Juli-September 2002.
- Yout, Hack-Churl. 2010. Practical application of the red algae pulp. Makalah disampaikan pada Kegiatan SEABFEX III tanggal 14 – 17 Juli 2010 di Surabaya
- Yulianto, K. 2003. Pengamatan penyakit “ice-ice” dan alga kompetitor fenomena penyebab kegagalan panen budidaya rumput laut (*Kappaphycus alvarezii* (C.) Agardh di Pulau Pari, Kepulauan Seribu tahun 2000 dan 2001. Prosiding Seminar Riptek Kelautan Nasional: 100-103.

LAMPIRAN

1. Karakteristik Responden

No.	Kelompok Umur	Desa Letman	Desa Sathean	Desa Letvuan	Desa Ohoibadar	Jumlah	Persentase (%)
1	15 – 24	-	6	3	-	9	22.50
2	25 – 34	2	2	3	5	12	30.00
3	35 – 44	7	2	1	5	15	37.50
4	45 – 54	1	-	3	-	4	10.00
5	55 – 64	-	-	-	-	-	-
6	> 64	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10	10	10	10	40	100.0

No.	Jenjang Pendidikan	Desa Letman	Desa Sathean	Desa Letvuan	Desa Ohoibadar	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SMP	3	-	-	-	3	7.50
3	SMA	7	10	10	10	37	92.50
4	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10	10	10	10	40	100.0

No.	Jenis Kelamin	Desa Letman	Desa Sathean	Desa Letvuan	Desa Ohoibadar	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	9	8	5	8	30	75.00
2	Perempuan	1	2	5	2	10	25.00
Jumlah		10	10	10	10	40	100.00

2. Biaya Investasi Untuk 1 Unit Usaha Budidaya Rumput Laut (1 Kelompok).

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembuatan Wadah	1	Paket	2,000,000	2,000,000
2	Peralatan Budidaya:				-
	a. Tali PE.Dia 8 mm	2	Ball	300,000	600,000
	b. Tali PE.Dia 6 mm	6.5	Ball	170,000	1,105,000
	c. Tali PE.Dia 2 mm	16	Ball	30,000	480,000
	d. Pelampung Bola Besar	6	Buah	100,000	600,000
	e. Pelampung Bola Kecil	100	Buah	6,000	600,000
	f. Mesin Ketinting Honda 5,5 PK	0.5	Unit	3,000,000	1,500,000
	g. Bodi Sampan	0.5	Unit	4,000,000	2,000,000
	h. Terpal 8 x 6	1	Buah	250,000	250,000
	i. Waring Hitam	0.1	Ball	600,000	60,000
	j. Pisau Kerja	1	Buah	15,000	15,000
	k. Sarung Tangan Kerja	0.1	Lusin	50,000	5,000
3	Bibit Rumput Laut	1	Paket	785,000	785,000
					10,000,000

3. Pendapatan Tiap Periode Produksi

Bulan Januari

Responden	Produksi (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Produksi (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Laba/Rugi (Rp)
1	244	10.000	2.440.000	600.000	1.840.000
2	247	10.000	2.470.000	600.000	1.870.000
3	227	10.000	2.270.000	600.000	1.670.000
4	217	10.000	2.170.000	600.000	1.570.000
5	235	10.000	2.350.000	600.000	1.750.000
6	218	10.000	2.180.000	600.000	1.580.000
7	214	10.000	2.140.000	600.000	1.540.000
8	230	10.000	2.300.000	600.000	1.700.000
9	221	10.000	2.210.000	600.000	1.610.000
10	222	10.000	2.220.000	500.000	1.720.000
Rataan	228	10.000	2.275.000	590.000	1.685.000
Jumlah	2.275	100.000	22.750.000	5.900.000	16.850.000

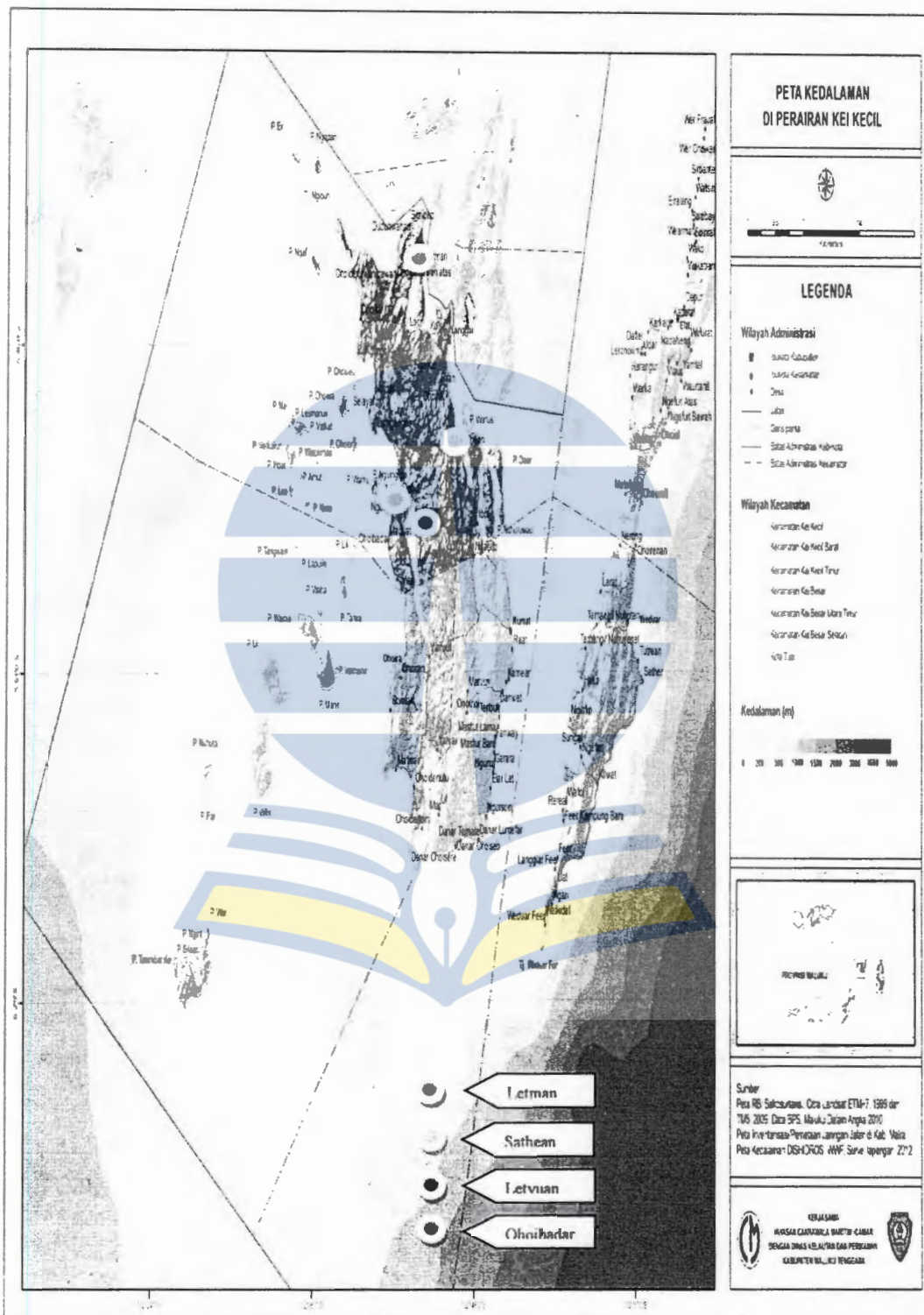
Bulan Juni

Responden	Produksi (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Produksi (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Laba/Rugi (Rp)
1	287	10.000	2.870.000	800.000	2.070.000
2	236	10.000	2.360.000	600.000	1.760.000
3	209	10.000	2.090.000	600.000	1.490.000
4	217	10.000	2.170.000	600.000	1.570.000
5	222	10.000	2.220.000	600.000	1.620.000
6	207	10.000	2.070.000	600.000	1.470.000
7	208	10.000	2.080.000	600.000	1.480.000
8	212	10.000	2.120.000	600.000	1.520.000
9	214	10.000	2.140.000	600.000	1.540.000
10	207	10.000	2.070.000	500.000	1.570.000
Rataan	222	10.000	2.219.000	610.000	1.609.000
Jumlah	2.219	100.000	22.190.000	6.100.000	16.090.000

Bulan Agustus

Responden	Produksi (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Produksi (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Laba/Rugi (Rp)
1	370	10.000	3.700.000	600.000	3.100.000
2	332	10.000	3.320.000	600.000	2.720.000
3	184	10.000	1.840.000	600.000	1.240.000
4	223	10.000	2.230.000	600.000	1.630.000
5	231	10.000	2.310.000	600.000	1.710.000
6	215	10.000	2.150.000	600.000	1.550.000
7	213	10.000	2.130.000	600.000	1.530.000
8	205	10.000	2.050.000	600.000	1.450.000
9	154	10.000	1.540.000	600.000	940.000
10	179	10.000	1.790.000	600.000	1.190.000
Rataan	231	10.000	2.306.000	600.000	1.706.000
Jumlah	2.306	100.000	23.060.000	6.000.000	17.060.000

4. Peta Lokasi



5. Gambar Sarana Budidaya

